

KEPERCAYAAN POLITIK TERHADAP PARTAI POLITIK

LOKAL : PANDANGAN GENERASI Z ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAMADHAN FITRIANI
NIM. 200801004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TAHUN 2024 M / 1445 H

KEPERCAYAAN POLITIK TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL:

PANDANGAN GENERASI Z ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan

Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

RAMADHAN FITRIANI

NIM. 200801004

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP.198812072018032001

Pembimbing II



Melly Masni, M.I.R

NIP.199305242020122016

KEPERCAYAAN POLITIK TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL:

PANDANGAN GENERASI Z ACEH BESAR

SKRIPSI

RAMADHAN FITRIANI

NIM. 200801004

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 02 April 2024 M
22 Ramadhan 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP.198812072018032001

Sekretaris,



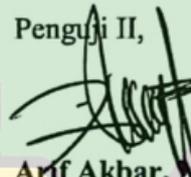
Melly Masni, M.I.R
NIP.199305242020122016

Penguji I,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP.198401012015031003

Penguji II,



Arif Akbar, M.A
NIP.199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP.197403271999031005

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ramadhan Fitriani
NIM : 200801004
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lambaya, 16 November 2002
Alamat : Lambaya, Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari, terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2024
Menyatakan,

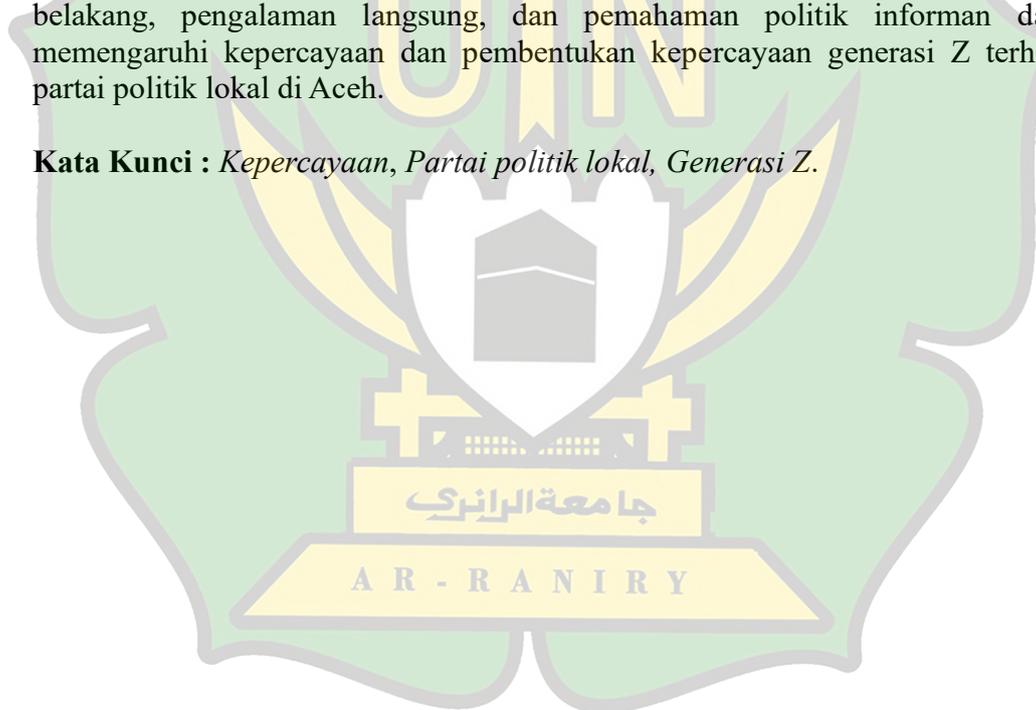



Ramadhan Fitriani

ABSTRAK

Kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal dianggap penting karena dapat memengaruhi stabilitas demokrasi, representasi politik, dan arah kebijakan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepercayaan politik dan pembentukan kepercayaan politik dari pandangan generasi Z di Aceh Besar. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan generasi Z Aceh Besar terhadap partai politik lokal cenderung kurang percaya atau terdapat keragu - ragan, persepsi terhadap partai politik lokal secara garis besar memiliki respon positif dan respon negatif, ditambah indikator *Competence* (kinerja) dan *Care* (kepedulian) menjadi yang paling dominan dalam mengukur tingkat kepercayaan generasi Z, dibanding dua indikator lainnya yakni *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen) dan *Reliability* (keandalan) serta faktor rasional lebih memiliki dampak daripada faktor relasional dalam membentuk kepercayaan politik. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang, pengalaman langsung, dan pemahaman politik informan dalam memengaruhi kepercayaan dan pembentukan kepercayaan generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh.

Kata Kunci : *Kepercayaan, Partai politik lokal, Generasi Z.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia serta petunjuk-Nya sepanjang perjalanan akademik ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SWA, keluarga serta para sahabatnya yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Kepercayaan politik terhadap partai politik lokal : pandangan generasi Z Aceh Besar*”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Maka dalam hal ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Ayahanda Kamal Dina dan Ibunda Juhaina yang senantiasa dan tak pernah lelah mendo’akan, memberi dukungan, dan cinta kasih tanpa syarat. Skripsi ini penulis persembahkan *special* untuk kedua orang tua penulis. Dan kepada saudara/i tercinta kakak – kakak, abang – abang, adik, keponakan yang lucu – lucu dan bijak serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan, Wakil Dekan dan jajarannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. dan Ibu Melly Masni, M.I.R selaku pembimbing I dan II, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Penasehat Akademik Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A dan seluruh Bapak Ibu dosen FISIP yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama ini serta seluruh Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh pihak yang terlibat di dalam skripsi ini.
6. Teman – teman Ilmu Politik angkatan 20 dan organisasi/kelompok yang penulis ikuti selama duduk dibangku kuliah yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Keluarga CCS yang isinya ciwi – ciwi *moodyan* dan baperan tapi punya semangat belajar yang tinggi, terima kasih telah mendukung dan mendo'akan.
7. *Special to* Azwinda Oktaviani Lubis, saudari tak sedarah. Teman yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka. Teman yang tahu segala proses yang penulis jalani selama kuliah. Teman yang apa adanya dalam bersikap dan bertindak. Terima kasih telah ikhlas dalam berteman, semoga Allah senantiasa menjaga persahabatan ini. Setelah ini, dimanapun nantinya engkau berproses, semoga selalu dikelilingi orang – orang baik yang selalu mendukungmu.

Dengan doa, usaha dan dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis merasa tidak mampu membalas semua bantuan yang telah diberikan oleh keluarga, bapak/ibu, dan teman-teman. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 25 Maret 2024

Ramadhan Fitriani
NIM. 200801004



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Political Trust	13
2.3 Partai Politik Lokal	18
2.4 Generasi Z	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.5 Informan Penelitian	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	25
3.8 Teknik Analisis Data	25

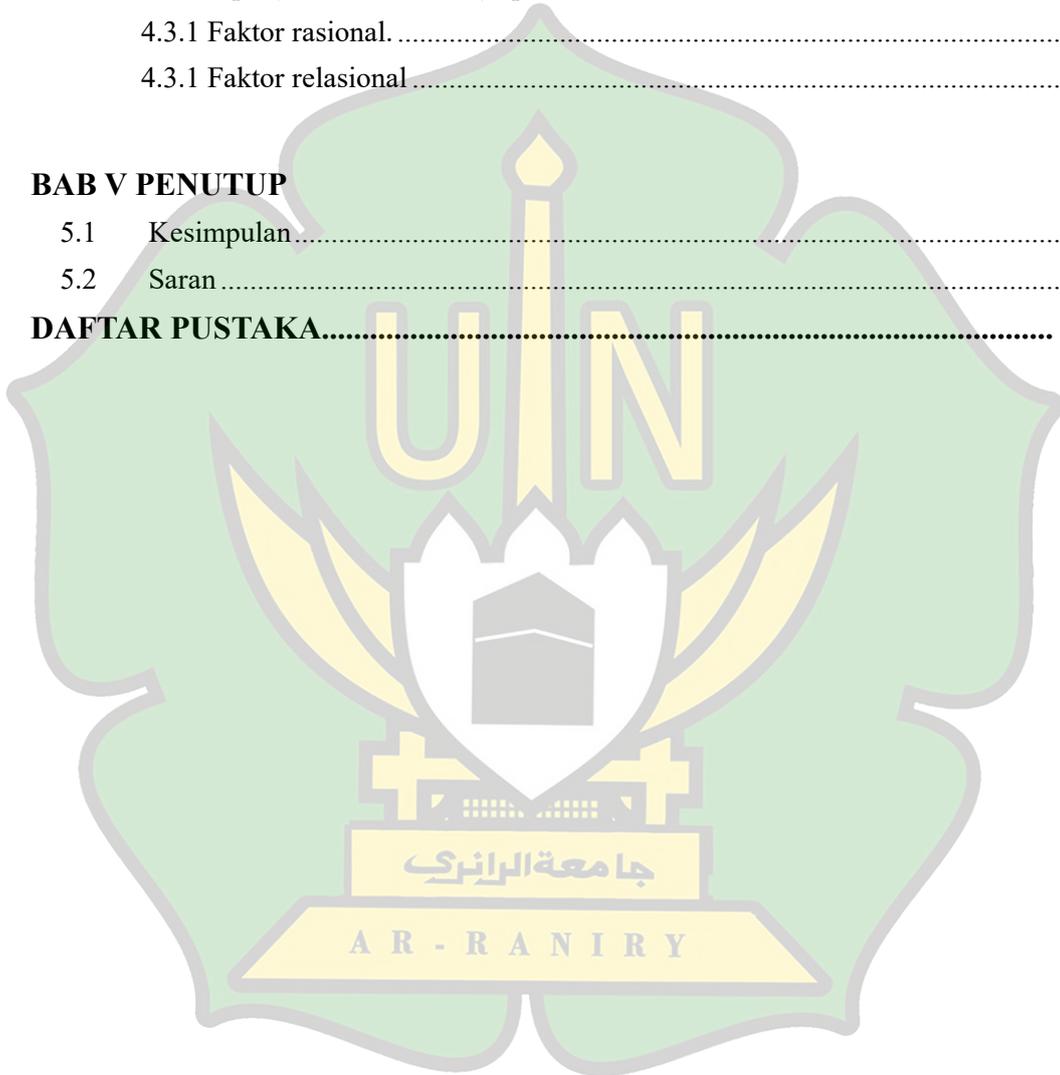
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Generasi Z dan Partai Politik Lokal di Aceh	27
4.1.1	Partai Politik Lokal di Aceh.....	27
4.2.1	Latar Belakang Gen-Z dan Persepsi terhadap Partai Politik Lokal	35
4.2	<i>Political Trust</i> Generasi Z terhadap Partai Politik Lokal di Aceh	42
4.3	Faktor penyebab terbentuknya <i>political trust</i>	53
4.3.1	Faktor rasional.....	53
4.3.1	Faktor relasional	59

BAB V PENUTUP

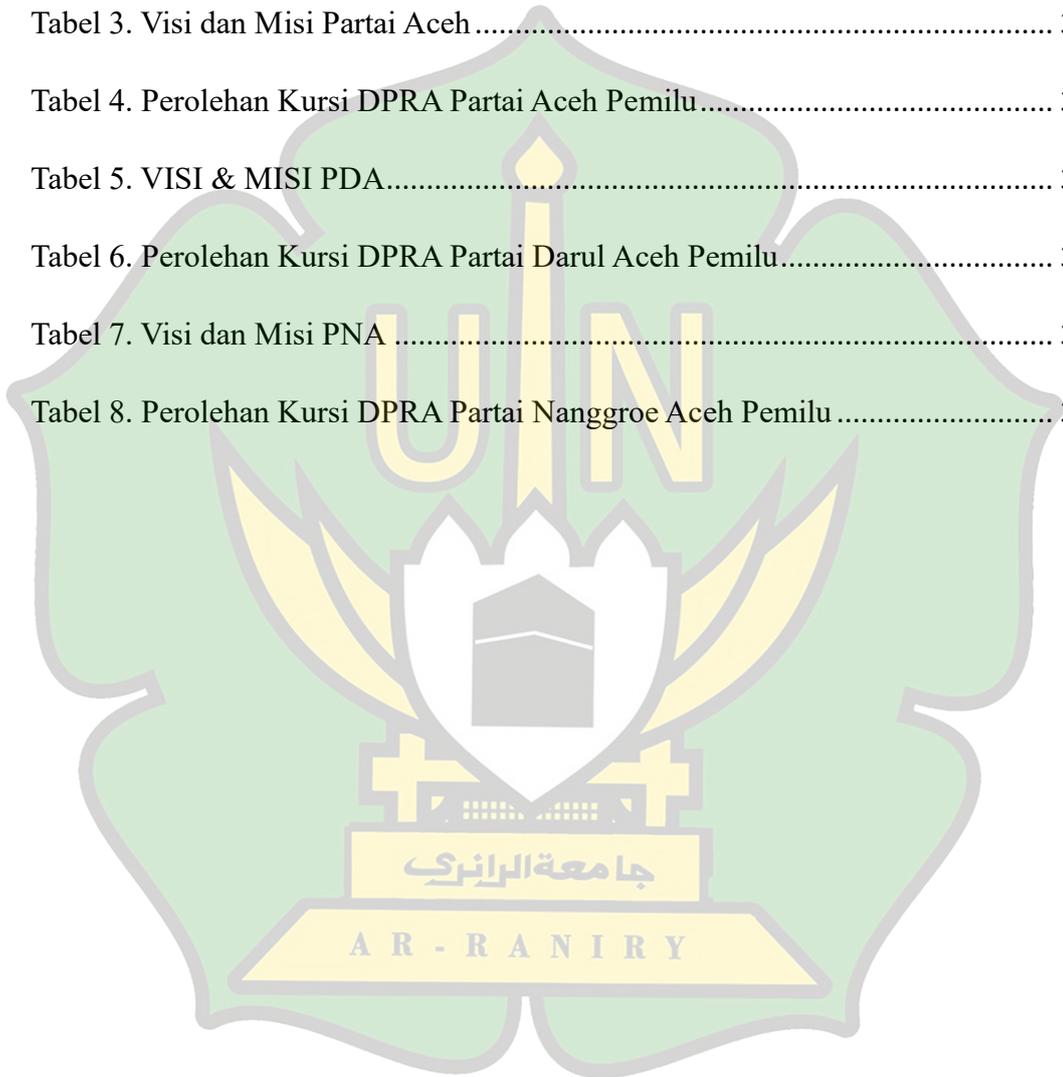
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------



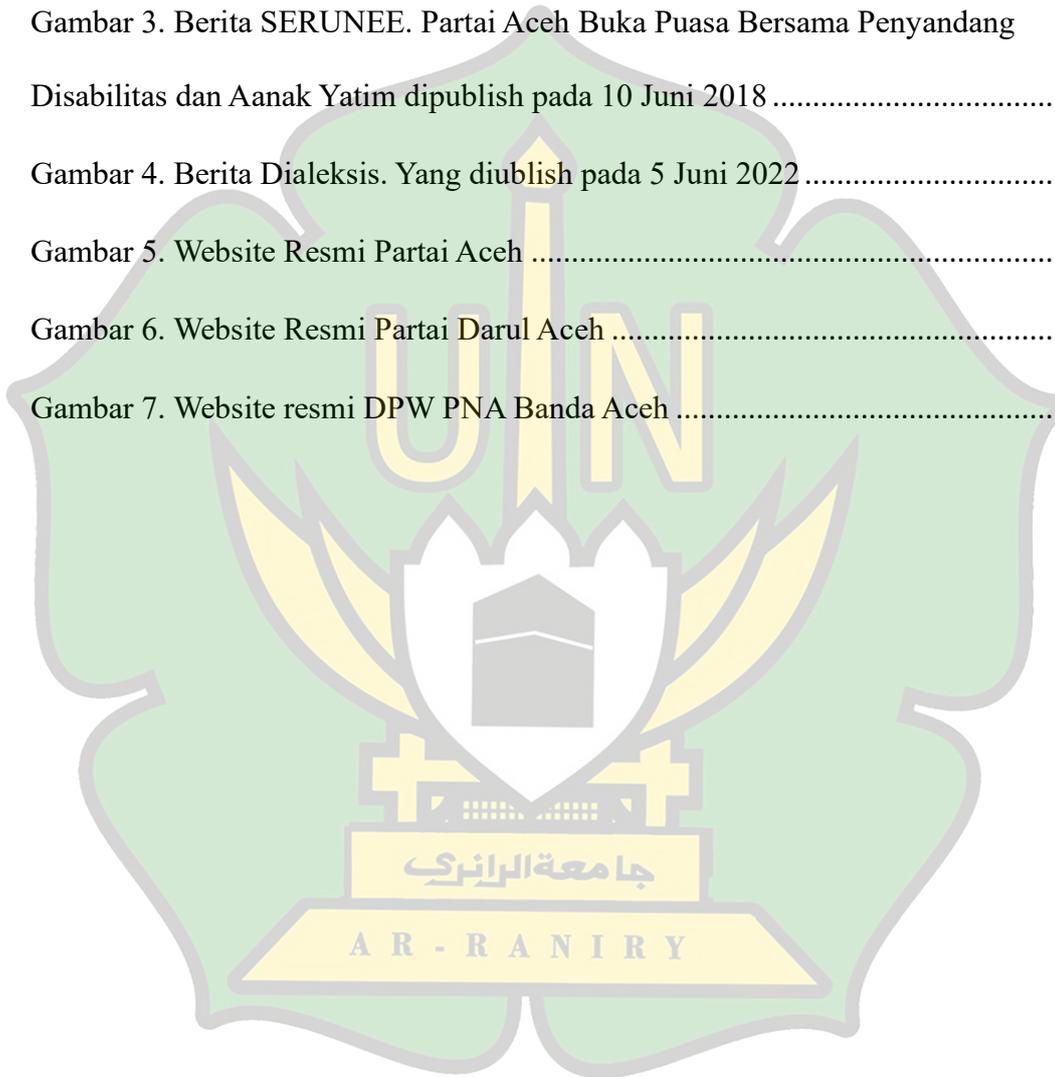
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terkait.....	12
Tabel 2. Informan Penelitian	23
Tabel 3. Visi dan Misi Partai Aceh	30
Tabel 4. Perolehan Kursi DPRA Partai Aceh Pemilu.....	30
Tabel 5. VISI & MISI PDA.....	32
Tabel 6. Perolehan Kursi DPRA Partai Darul Aceh Pemilu.....	32
Tabel 7. Visi dan Misi PNA	33
Tabel 8. Perolehan Kursi DPRA Partai Nanggroe Aceh Pemilu	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta konseptual kepercayaan politik	15
Gambar 2. Berita ANTRAACEH.com pada 04 Desember 2013	44
Gambar 3. Berita SERUNEE. Partai Aceh Buka Puasa Bersama Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim dipublish pada 10 Juni 2018	45
Gambar 4. Berita Dialeksis. Yang diublish pada 5 Juni 2022	46
Gambar 5. Website Resmi Partai Aceh	56
Gambar 6. Website Resmi Partai Darul Aceh	57
Gambar 7. Website resmi DPW PNA Banda Aceh	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian	70
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	72
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Aceh memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh. Akar permasalahan konflik Aceh berorientasi pada ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan diskriminasi dari pemerintah. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi gerakan separatis menuntut kemerdekaan Aceh dari Indonesia.

Hadirnya perjanjian MoU Helsinki yang ditetapkan pada 15 Agustus 2005 menjadi jalan bagi rakyat Aceh untuk menata kehidupan baru yang lebih baik setelah konflik berkepanjangan. Banyak aspek di Aceh yang berubah setelah periode konflik, seperti situasi keamanan, kondisi sosial-ekonomi, dinamika politik, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial dan keagamaan, termasuk juga provinsi Aceh dapat membentuk partai politik lokalnya sendiri.¹

Terdapat klausul yang menyatakan akan dibentuknya parpol lokal dalam MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ialah: *" As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment of Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding the aspirations of Acehnese people for local political parties, GoI will create, within one year or at the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the*

¹ Abubakar, B., Shadiqin, S. I., & Saby, Y. (2021). Membincangkan Damai Aceh: Politik, Agama dan Pendidikan yang Berkelanjutan. Hlm.15

*establishment of local political parties in Aceh in consultation with Parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end".*²

Klausul 1.2.1 “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.

Undang - Undang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan regulasi yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, sebagai pengganti Undang - Undang Otonomi Khusus Aceh. UUPA disusun dengan tujuan untuk membangun kepercayaan antara Aceh dan pemerintah pusat pasca konflik di Aceh. UUPA merupakan undang-undang khusus yang ditetapkan RI untuk Aceh dan terbentuk setelah melalui perdebatan panjang. UUPA mengatur pemerintahan Aceh, termasuk lembaga, wewenang, dan tugas pemerintahan Aceh. UUPA juga mengurus parpol lokal di Aceh, yang dapat didirikan dan dibentuk oleh masyarakat Aceh.³

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh juga mengatur secara rinci pembentukan partai politik lokal

² *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement.* (2005). Klausul 1.2.1

³ Zainal, S. (2016). Transformasi konflik Aceh dan relasi sosial-politik di era desentralisasi. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, hlm. 96

serta pelaksanaannya yang harus sejalan dengan prosedur politik pemerintah pusat. Maka sejak pemilihan umum tahun 2009, partai politik berhak mengikuti kontestasi politik.

Pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 09 April 2009, menurut hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 6 parpol lokal Aceh yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yakni Partai Aceh yang berhasil memperoleh suara 1.007.173 suara (46,91%) dengan jumlah kursi 33 dan PDA memperoleh 39.706 suara (1,85%) dan mendapat 1 kursi di parlemen. Sementara itu, empat parpol lokal lainnya tidak memperoleh kursi di parlemen, di antaranya Partai SIRA 38.157 (1.78%), PRA 36.574 (1.70%), PBA 16.602 (0.77%), dan PAAS 11.117 (0.52%).⁴

Selanjutnya, pada pemilu 09 April 2014 daerah pemilihan di Aceh menjadi lebih banyak yakni 10 (sepuluh) dengan penambahan jumlah kursi sebanyak 81 kursi. Namun, hanya ada tiga parpol lokal saja yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu yakni Partai Aceh yang memperoleh 847.956 suara (35.80%) dengan jumlah kursi 29, PNA meraih suara 16.350 (3,70%) dan mendapat 3 kursi di parlemen, sementara PDA mendapatkan 1 kursi di parlemen dengan perolehan suara 10.169 (1.23%).⁵

Selanjutnya di pemilu tahun 2019 hasil keputusan KPU menetapkan empat partai lokal yang berkompetisi di pemilihan umum April 2019 yaitu Partai Aceh

⁴ UPDATE: Inilah Anggota DPRA 2009-2014 (<https://acehkita.com/update-inilah-anggota-dpra-2009-2014/> diakses pada 09/11/2023)

⁵ Inilah 81 Calon Terpilih Anggota DPRA 2014-2019 dari 23 Kabupaten Kota (<https://lintasgayo.com/48401/inilah-calon-terpilih-anggota-dpra-2014-dari-23-kabupaten-dan-kota.html> diakses pada 09/11/2023)

jumlah kursi yang diraih 18 dengan total perolehan suara 261.109, Partai Nanggroe Aceh (PNA) mendapatkan 6 kursi di parlemen dengan perolehan suara sebanyak 61.973, PDA meraih 3 kursi dengan perolehan 21.262 suara, ditambah lagi 1 kursi yang diperoleh Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dengan total 6.302 suara.⁶

Sejak pemilu yang berlangsung selama tiga periode termasuk pemilu 2024, partai lokal Aceh mengalami penurunan perolehan suara, hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota. Menurut Ikramatoun, Zulfan, & Aminah, dalam tulisan “*The Decline of Local Political Parties in Post-Conflict Aceh*” hal ini disebabkan oleh kehilangan kepercayaan publik, pesimisme di kalangan aktor politik, kurangnya integritas partai dan lemahnya sumber daya manusia parpol lokal, dan manajemen organisasi yang buruk, serta konflik internal di dalam partainya.⁷

Penurunan perolehan partai politik lokal suara salah satu penyebabnya yakni kehilangan kepercayaan publik. Maka peneliti tertarik untuk melihat kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal. Kepercayaan dari generasi Z sangat penting karena dapat memengaruhi agenda politik. Jika generasi Z memiliki kepercayaan yang tinggi pada partai politik, maka mereka akan lebih aktif dalam memantau kinerja partai dan mendorong akuntabilitas. Generasi Z dapat menjadi penggerak perubahan yang mendorong partai politik untuk lebih transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan terbuka terhadap gagasan baru. Kepercayaan generasi Z terhadap partai politik juga dapat mempengaruhi seberapa

⁶ Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – Aceh (<https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-aceh> diakses pada 09/11/2023)

⁷ Ikramatoun, S., Zulfan, Z., & Aminah, A. (2023). *The Decline of Local Political Parties in Post-Conflict Aceh: A Qualitative Study*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), hlm.45

lama mereka akan terlibat dalam politik, yang kemudian dapat menghasilkan kader – kader baru dan kelanjutan partisipasi politik.

Penelitian ini berfokus pada tiga partai lokal Aceh yakni Partai Aceh (PA), Partai Darul Aceh (PD Aceh) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dikarenakan ketiga partai tersebut memiliki perwakilan terpilih tingkat DPRA minimal dua kali dalam pemilihan umum. Dalam penelitian ini kabupaten Aceh Besar menjadi fokus lokasi dalam penelitian ini, dikarenakan wilayah tersebut dapat merepresentasikan perolehan suara yang menyeluruh terhadap partai politik lokal.

Dari banyaknya tulisan mengenai parpol lokal di Aceh, belum ada yang membahas tentang relasi pemuda terhadap parpol lokal mengenai tingkat kepercayaan. Sebab, ditahun 2024 secara nasional akan menyumbang suara ketiga terbanyak yakni 46.800.161 pemilih atau setara 22,85% dari total DPT pemilu 2024. Sedang di provinsi Aceh dari total DPT 3.742.037 terdapat 931.705 pemilih dari kalangan generasi Z. Jumlah pemilih gen Z dipastikan akan bertambah pada pemilu berikutnya.⁸

Pasalnya perilaku pemilih generasi Z berbeda dengan generasi di bawahnya, sikap politik generasi Z lebih banyak dituangkan dalam kebebasan berpendapat di media sosial. Perbedaan karakteristik yang paling dasar antara gen Z dengan orang tuanya yang mewakili generasi sebelumnya adalah akses informasi, yang mana generasi ini dapat menikmati kepastian informasi tunggal, sedang generasi Z tidak mendapatkan hal tersebut. Sejak usia dini, generasi Z menerima informasi dalam

⁸ Nabilah Muhamad KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diakses pada 12/01/2024

jumlah besar yang diperbarui setiap detik. Oleh karena itu, perlu ada pengarahan terhadap generasi ini.⁹

Tingkat kepercayaan generasi Z terhadap partai politik memiliki implikasi yang signifikan bagi stabilitas demokrasi, representasi politik, dan arah kebijakan di masa mendatang. Partai politik dan pemimpin politik harus memahami dan merespons aspirasi dan kekhawatiran generasi Z untuk mempertahankan dan memperkuat kepercayaan mereka dalam sistem politik.

Maka, penelitian ini akan melihat bagaimana kepercayaan politik (*political trust*) generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh serta bagaimana terbentuknya kepercayaan politik di kalangan generasi Z Aceh Besar, dengan mengangkat judul **“Kepercayaan Politik Terhadap Partai Politik Lokal : Pandangan Generasi Z Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kepercayaan generasi Z Aceh Besar terhadap partai politik lokal di Aceh?
2. Apa saja penyebab terbentuknya kepercayaan generasi Z Aceh Besar terhadap parpol lokal di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹ Wibisana, Sebelum Meminta Gen Z Berpartisipasi dalam Pemilu: (<https://www.dw.com/id/sebelum-meminta-gen-z-berpartisipasi-dalam-pemilu/a-65706306> diakses pada 08/25/2023)

Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana tingkat kepercayaan politik (*political trust*) generasi Z terhadap partai politik lokal, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepercayaan politik tersebut dari pandangan gen-Z Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Partai Politik Lokal Aceh

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi parpol tentang perbaikan citra parpol di mata generasi Z. Parpol dapat menggunakan temuan ini untuk mengadaptasi *platform* dan strategi kampanye untuk lebih mendekati aspirasi dan nilai-nilai generasi Z. Dengan memahami kepercayaan politik generasi Z, penelitian ini dapat membantu merancang pendekatan yang lebih inklusif dalam politik lokal. Juga dapat memotivasi parpol untuk memperkuat keterlibatan generasi Z dalam proses politik, seperti mendorong partisipasi dalam pemilihan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan politik.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi secara substansial terhadap pengetahuan akademis di bidang ilmu politik dan studi politik lokal. Ini akan membantu mengisi celah pengetahuan tentang dinamika politik di Aceh dan faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal. Hasil

penelitian dapat menjadi referensi untuk pemahaman yang lebih baik tentang politik Aceh dan dapat membantu mahasiswa dan peneliti dalam menjalani studi-studi serupa di daerah-daerah lain.

3. Bagi Generasi Z

Penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi kelompok generasi Z dalam membantu memahami diri lebih mendalam, peningkatan kesadaran politik, serta keputusan politik yang lebih sesuai dengan nilai – nilai dan kepentingan generasi mereka.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini digunakan sebagai landasan bagi peneliti untuk mencakup teori-teori atau hasil temuan sebelumnya dalam mendukung penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga dimanfaatkan sebagai perbandingan. Berikut adalah beberapa penelitian terkait:

Penelitian pertama, yang dilakukan Lusy Asa Akhrani, Fitsabilla Imansari, dan Faizah dalam jurnal *mediapsi* dengan judul “Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih pemula” Penelitian ini bertujuan untuk mengamati keterkaitan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik pada pemilih pemula. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 105 responden pemilih pemula, yang dipilih menggunakan teknik *non probability* sampling (*purposive sampling*). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik ($r=0.296$, $n=105$, $p=0.002$), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan politik, semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik. Temuan ini memiliki implikasi praktis bahwa suara dari pemilih pemula memiliki nilai penting bagi partai politik.

Oleh karena itu, pemerintah dan partai politik perlu meningkatkan kinerja politiknya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pemula.¹⁰

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Mu'ammam Zaenal Arifin dalam skripsinya “Pengaruh *big-five personality*, *political efficacy*, dan *political trust* terhadap partisipasi politik” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan membuktikan dampak dari *big-five personality*, *political efficacy*, dan *political trust* terhadap partisipasi politik masyarakat. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta yang terdaftar sebagai pemilih tetap, yang jumlahnya mencapai 7.211.891 orang (KPU, 2018), dengan beragam latar belakang wilayah, usia, dan pendidikan. Sampel diambil menggunakan metode *non-probability* sampling dengan jumlah responden sebanyak 253 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari *big-five personality*, *political efficacy*, dan *political trust* terhadap partisipasi politik, dengan kontribusi sebesar 22,8% dalam penjelasan variabilitas partisipasi politik. Secara spesifik, bahwa dimensi yang berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik adalah *extraversion*, *openness to experience*, *internal political efficacy*, dan *trust with politicians*, sementara dimensi lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik.¹¹

¹⁰ Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan politik dan partisipasi politik pemilih pemula. MEDIAPSI. Hlm.1

¹¹ Baidun, A. Pengaruh *big-five personality*, *political efficacy*, dan *political trust* terhadap partisipasi politik (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Penelitian ketiga, yang dilakukan Lindi Nuriya dalam skripsinya “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas Dan Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Deskriptif Analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang” Dalam tulisan ini, peneliti berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas dan partai politik. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap ormas dan partai politik berdasarkan dimensi *trust*. Sedangkan struktur yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mencakup: (1) Sosialisasi politik, yang merupakan proses transmisi nilai, ide, dan informasi politik kepada individu dalam lingkungannya. (2) Struktur organisasi, aktor, dan kinerja partai politik. (3) Kepentingan pribadi, yang mendorong seseorang untuk mempercayai partai politik berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ormas maupun partai politik dipengaruhi oleh orientasi masyarakat dalam memandang kedua entitas tersebut. Orientasi masyarakat ini terbentuk dari kondisi-kondisi awal yang dialami di lingkungan sosial dan politik mereka.¹²

¹² Nuriya, L. (2017). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas Dan Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Deskriptif Analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Tabel 1. Penelitian Terkait

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akhvani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan politik dan partisipasi politik pemilih pemula. <i>MEDIAPSI</i> , 4(1), 16.	Penelitian ini menyatakan bahwa pentingnya suara dari pemilih pemula bagi partai politik penting. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pemula, pemerintah dan partai politik harus meningkatkan kinerja politik mereka.
2.	Baidun, A. Pengaruh big-five personality, political efficacy, dan political trust terhadap partisipasi politik (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>big-five personality</i> , <i>political efficacy</i> , dan <i>political trust</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, dengan kontribusi sebesar 22,8%. Secara spesifik, dimensi-dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik secara signifikan adalah <i>extraversion</i> , <i>openness to experience</i> , <i>internal political efficacy</i> , dan <i>trust with politicians</i> , sementara dimensi lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik.
3.	Nuriya, L. (2017). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas Dan Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Deskriptif Analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap ormas dan partai politik berdasarkan dimensi <i>trust</i> .

Sumber : Data diolah,2023

Dari berbagai penelitian terkait yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kesamaan pada fokus penelitian yakni kepercayaan politik. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan, variabel, serta objek penelitian. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus membahas mengenai kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh.

2.2 Political Trust

Political trust dipahami sebagai dukungan warga negara terhadap lembaga-lembaga politik seperti pemerintah dan parlemen dalam menghadapi ketidakpastian atau kerentanan terhadap tindakan mereka. Ini dianggap penting untuk pemerintahan demokratis, karena memengaruhi kualitas demokrasi perwakilan. Meskipun kepercayaan politik sering dianggap sebagai nilai pro-demokrasi, keberadaannya tidak selalu merugikan demokrasi karena dapat mendorong keterlibatan politik melalui skeptisisme, yang memacu warga negara untuk menilai lembaga-lembaga politik berdasarkan kemampuan mereka sendiri.¹³

Political trust didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik hal ini mencakup sikap atau tindakan yang dinyatakan oleh individu atau kelompok dalam konteks politik, melibatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan penerapan standar masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan dalam pengaturan administratif.

¹³ Van der Meer, T. W. (2017). Political trust and the “*crisis of democracy*”. In Oxford research encyclopedia of politics. Hlm 1

Kepercayaan politik mengacu pada sikap, nilai, dan pendapat yang dimiliki individu mengenai masalah politik, ideologi, dan kebijakan. Kepercayaan ini membentuk pemahaman individu tentang dunia politik dan memandu perilaku politik dan pengambilan keputusan. Kepercayaan politik dapat mencakup berbagai topik, termasuk pandangan tentang pemerintah, demokrasi, keadilan sosial, sistem ekonomi, kebijakan luar negeri, dan hak-hak individu.¹⁴

Kepercayaan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, sosialisasi, pendidikan, media, dan pengaruh budaya dan ideologis. Kepercayaan politik dapat beragam dan dapat bervariasi antar individu, komunitas, dan masyarakat. Kepercayaan ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap politik, perilaku memilih, dan partisipasi politik.¹⁵

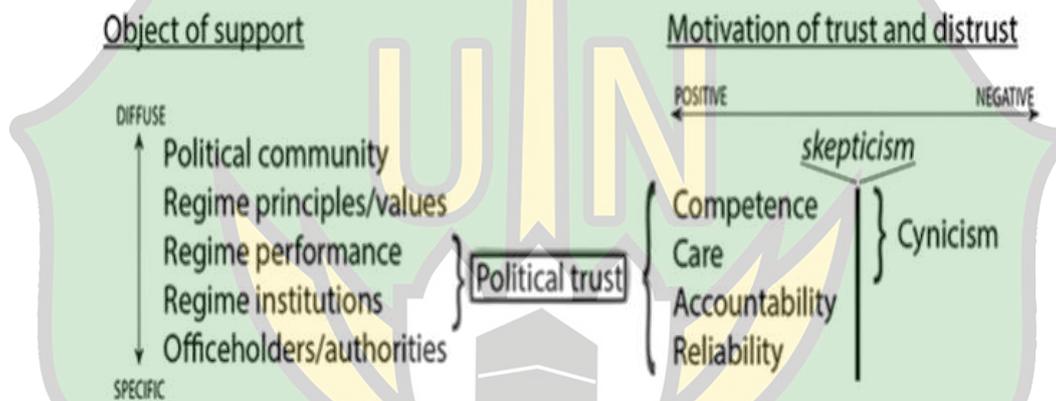
Menurut Van der Meer dalam tulisannya "*Political trust and the crisis of democracy*" terdapat indikator dalam mengukur *political trust* terhadap institusi politik yaitu :

- *Competence* (kinerja), sesuatu yang menunjukkan *strong performance* yang berkaitan dengan kemampuan dan kinerja pihak partai politik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
- *Care* (Keperdulian), mencakup kemampuan dan kesediaan partai untuk memperlakukan setiap warganya secara adil dan merata, tanpa memandang latar belakang masyarakat serta memenuhi hak minoritas.

¹⁴ *Ibid.*Hlm 1

¹⁵ *Ibid.*Hlm 1

- *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen), kemampuan dan kewajiban partai politik untuk bertanggung jawab serta komitmen atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat.
- *Reliability* (keandalan), adalah sejauh mana masyarakat dapat mengandalkan dan percaya bahwa hasil kebijakan partai politik akan sesuai dengan janji, serta seberapa cepat sebuah partai dapat merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁶



Gambar 1. Peta konseptual kepercayaan politik
 Sumber : *Political Trust and the "Crisis of Democracy"*

Dalam peta konseptual kepercayaan politik diatas, penelitian ini berfokus pada *regime institutions* yang mengacu pada lembaga-lembaga politik. Salah satu lembaga politik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah partai politik lokal. Kepercayaan terhadap *regime institutions* sangat penting untuk stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan pada lembaga-lembaga tersebut, ini dapat menguatkan legitimasi dan kinerja pemerintah.

¹⁶ *Ibid.* Hlm.5

Sebaliknya, kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, protes, dan ketidakpatuhan terhadap pemerintahan.¹⁷

Terdapat dua faktor yang dapat membentuk kepercayaan menurut Job (2005) dan Putnam (dalam Tranter dan Skrbis, 2009), ada dua yaitu:

- a. Faktor rasional, yang bersifat strategis dan penuh perhitungan, mengindikasikan bahwa seseorang bisa dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau menempati jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan (*trustor*) mampu memperkirakan apakah orang yang diberi kepercayaan (*trustee*) dapat memenuhi harapan dari *trustor* tersebut. Pandangan ini menyatakan bahwa kepercayaan umumnya muncul dari pertimbangan rasional, serta mengasumsikan bahwa memberikan kepercayaan kepada orang lain memerlukan informasi dan pengetahuan sebelumnya tentang orang tersebut.
- b. Faktor relasional, yang juga dikenal sebagai faktor afektif atau moralis, adalah jenis kepercayaan yang berakar pada etika yang baik dan didasarkan pada kebaikan individu. Kepercayaan relasional terbentuk atas dasar nilai-nilai yang disepakati oleh suatu komunitas, emosi, dan kepentingan bersama. Sebelum memberikan kepercayaan, komunitas melakukan pertimbangan dan tidak dibebankan perubahan hanya pada satu orang saja..¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tranter, B & Skrbis, Z. (2009). Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders. Australian Journal of Political Science, hlm.2

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara masyarakat, kepercayaan politik, dan partai politik di Indonesia. Peran komunikasi politik simbolik dalam menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat umum, khususnya di negara-negara yang baru demokratis.¹⁹ Meskipun banyak generasi muda Indonesia yang memiliki rasa ketaatan yang kuat terhadap lembaga eksekutif, namun mereka lebih skeptis terhadap lembaga legislatif. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan hubungan antara masyarakat dengan berbagai instansi pemerintah.²⁰

Kepercayaan politik juga menyoroti pentingnya transparansi keuangan pada partai politik yang mungkin dapat mempengaruhi kepercayaan pemilih. Terakhir, mengkaji peran kompleks faksi Islam dalam demokrasi Indonesia, yang dapat mempengaruhi kepercayaan generasi muda terhadap politik. Kajian-kajian tersebut secara bersama-sama menyoroti berbagai bentuk kepercayaan politik yang ada di kalangan masyarakat Indonesia dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi, transparansi keuangan, dan ideologi politik.²¹

¹⁹ Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2020). Symbolic political communication, and trust: a young voters' perspective of the Indonesian presidential election. *Journal of political marketing*, Hlm.9

²⁰ Hidayatullah, M. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Faktor Kepercayaan Politik, Dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Tidak Memilih (Golput) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 (Studi di Kecamatan (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

²¹ Hasan, N. (2012). Islamist party, electoral politics and Da'wah mobilization among youth: The prosperous justice party (PKS) in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 17-47.

2.3 Partai Politik Lokal

Partai politik lokal merupakan suatu entitas politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela yang bertempat tinggal di Aceh, dengan tujuan dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Rakyat Aceh (DPRA), Bupati/Dewan Perwakilan Rakyat Kota (RPDC), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.²²

Parti politik lokal menjadi organisasi politik yang beroperasi di tingkat regional atau lokal dalam wilayah geografis tertentu, seperti kota dan provinsi,. Partai politik lokal memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal juga bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di bidang pemerintahan dan legislatif, memungkinkan parlok untuk membentuk kebijakan dan keputusan yang secara langsung berdampak pada populasi lokal.²³

Partai politik lokal mewakili kepentingan daerah tertentu atau komunitas lokal dalam sistem politik yang lebih besar. Parlok bertujuan untuk mengubah aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik dan memastikan akuntabilitas. Peran dan fungsi partai politik lokal di Aceh sangat penting untuk transisi dari konflik ke pemerintahan mandiri yang demokratis.²⁴

²² Nomor, P. P. R. I. (20). Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.Hlm.2

²³ Hajad, V., & Susetiawan, S. (2022). Diffusion of Ideology and Role of Local Party Control to Understand Aceh Post-War. *Journal of Government and Civil Society*.Hlm.71

²⁴ Törnquist, O., Prasetyo, S. A., & Birks, T. (2010). *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*, Yogyakarta. Hlm. 33

Partai politik lokal berfokus pada isu-isu lokal dan bertujuan untuk mewakili kepentingan warga di wilayah masing-masing. Partai terlibat dalam kegiatan seperti kampanye, penyelenggaraan acara, dan memobilisasi dukungan untuk pemilihan lokal. Partai politik lokal dicirikan oleh tingkat aktivitas mereka yang tinggi antara pemilihan dan ketergantungan mereka pada relawan anggota selama kampanye pemilihan.²⁵

2.4 Generasi Z

Teori mengenai generasi pertama kali diusulkan oleh Karl Mannheim dalam esainya yang berjudul "*The Problem of Generations*" pada tahun 1923. Sejak itu, berbagai ahli mulai mengembangkan teori yang berhubungan dengan generasi ini. Karl Mannheim mendefinisikan generasi sebagai sekelompok individu dengan rentang usia tertentu yang mengalami peristiwa penting dalam sejarah bersama. Generasi merupakan kumpulan individu yang mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kesamaan dalam tahun kelahiran, usia, lokasi, dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka yang memengaruhi pertumbuhan mereka. Teori generasi ini kemudian dikembangkan oleh banyak ahli, yang secara umum mengklasifikasikan generasi-generasi tersebut menjadi beberapa kelompok, termasuk generasi *pre-boomers*, *baby boomers*, generasi X, generasi Y atau *millennials*, dan generasi Z yang juga dikenal sebagai *iGeneration* atau generasi *net*.

26

²⁵ Scarrow, S. E. (1993). Does local party organisation make a difference? Political parties and local government elections in Germany. *German Politics*, 2(3), 377-392.

²⁶ Muannas, M. (2018). Proses Gatekeeping Terkait Redistribusi Konten Media Sosial: Perspektif Generasi Z. *Jurnal Jurnalisa*.Hlm.262

Generasi Z adalah generasi yang terdiri dari individu yang lahir tahun 1997 hingga tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa usia para generasi Z di tahun 2024 adalah kisaran umur 11 tahun sampai 27 tahun. Karakteristik Generasi Z berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga pendekatan terhadap mereka juga harus disesuaikan. Secara umum, Generasi Z cenderung tidak tertarik dengan narasi yang disampaikan melalui buku-buku cetak. Mereka lebih menyukai informasi yang dapat diakses secara online, terutama dalam bentuk audio dan visual. Generasi ini memiliki berbagai karakteristik, termasuk kemampuan multitasking, keterampilan teknologi yang kuat, keterbukaan terhadap berbagai hal, preferensi terhadap konten audio-visual, serta kekreatifan, inovasi, dan sikap kritis.



BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Metode ini didasarkan pada suatu prosedur pemecahan masalah yang meneliti dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.²⁷ Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan penjelasan yang mendalam dan gambaran yang jelas mengenai fenomena atau gejala sosial yang diamati.²⁸

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nawawi, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah prosedur pemecahan masalah yang menyelidiki situasi saat ini berdasarkan fakta-fakta yang diamati, tanpa mengubah atau menambahkan interpretasi.²⁹

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kepercayaan politik (*political trust*) generasi Z terhadap partai politik lokal yakni Partai Aceh (PA), Partai Darul Aceh (PDA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) serta penyebab terbentuknya kepercayaan politik tersebut menurut pandangan generasi Z Aceh Besar.

3.3 Lokasi Penelitian

²⁷ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Hlm.67.

²⁸ Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia. Hlm.110

²⁹ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007). Hlm 67.

Pemilihan lokasi penelitian menjadi aspek yang krusial, terutama dalam memvalidasi data yang terkumpul, serta untuk membatasi cakupan ruang lingkup penelitian dan fokus pembahasan pada fenomena sosial yang diteliti sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Maka, terkait dengan latar belakang dalam penelitian ini, peneliti memilih kabupaten Aceh Besar sebagai lokasi penelitian, dikarenakan wilayah ini dapat merepresentasikan perolehan suara yang menyeluruh terhadap partai politik lokal dalam pemilihan legislatif, sehingga mampu mengukur tingkat kepercayaan terhadap parpol lokal di Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang dapat memberikan gambaran terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang akan dikumpulkan sebagai fokus utama dalam proses pengelolaan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber awal atau lokasi di mana objek penelitian tersebut berada. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan kelompok generasi Z yang berdomisili di Aceh Besar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua, yang dapat diakses melalui berbagai media seperti buku, berita, situs web, jurnal, studi sebelumnya, dan dokumen resmi pemerintah.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, sumber informasi terdiri dari informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dan mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan konteks dan situasi latar belakang penelitian. Penentuan informan menjadi penting dalam memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan sengaja sesuai dengan karakter yang telah ditentukan.³⁰

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah generasi Z kelahiran 1997-2007 yang sudah memiliki hak suaranya dalam pemilihan umum dan berdomisili di kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB)	4
2.	Siswa/I Sekolah Menengah Atas Aceh Besar	5
3.	Politisi Muda Parlok	3
4.	Politisi Muda Parnas	2
5.	Komunitas Hobi	2
6.	Santri / Santriwati	4
7.	Kelompok Difabel	1
8.	Enterpreneur muda	2
Jumlah		23

³⁰ Faisal Hanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).Hlm.67

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang direncanakan sebelumnya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.³² Sedang wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan menggali informasi yang lebih mendalam kepada informan dengan tetap memperhatikan fokus penelitian.³³

³¹ Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia. Hlm.149

³² *Ibid*, hlm. 153

³³ *Ibid*, hlm 154

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, analisis mendalam terhadap fenomena sosial, serta pencatatan hasil temuan secara langsung di lokasi penelitian..³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan yang merekam suatu peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berwujud tulisan, berita, gambar, atau karya-karya individu. Dokumentasi memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan observasi dan wawancara, karena menyediakan bukti visual dan catatan yang mendukung keakuratan dan kredibilitas penelitian..³⁵

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik uji *dependability* yang melibatkan audit terhadap seluruh proses penelitian..³⁶

Peneliti memanfaatkan auditor independen (dosen pembimbing) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua aktivitas penelitian yang dilakukan, dari awal hingga akhir penelitian ini.

3.8 Teknik Analisis Data

³⁴ *Ibid*, hlm. 150

³⁵ *Ibid*, hlm. 158

³⁶ *Ibid*, hlm. 177

Kegiatan analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kegiatan ini terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan penekanan pada data yang terkumpul dari lapangan, berdasarkan catatan yang disusun oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan. Dengan menggunakan catatan tersebut, peneliti dapat melakukan reduksi data melalui tahapan pemilihan data sesuai dengan fokus penelitian, pengelompokan data berdasarkan kategori, serta penerapan pengkodean data sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disiapkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap berikutnya adalah menyajikan data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Penyajian data yang efektif dapat memudahkan proses penelitian berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir melibatkan penarikan kesimpulan, sehingga data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk merumuskan hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm.167

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Generasi Z dan Partai Politik Lokal di Aceh

4.1.1 Partai Politik Lokal di Aceh

Pada prinsipnya, partai politik lokal mengacu pada kelompok organisasi yang beroperasi di tingkat lokal atau daerah provinsi. Munculnya partai politik lokal bervariasi di setiap wilayah dan negara yang menerapkannya, tergantung pada sistem politik, konteks sejarah, serta isu – isu regional yang muncul. Karena itu, keberadaan partai politik lokal hanya ada pada wilayah tertentu saja. Sebagai contoh, munculnya partai politik lokal di Aceh merupakan hasil dari situasi pasca konflik antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang mana kelompok atau gerakan perlawanan berubah menjadi parpol lokal. Tidak hanya Indonesia, negara lain seperti Jerman, Spanyol, India dan beberapa negara tertentu lainnya juga memiliki partai politik lokal.³⁸

Sementara itu, partai politik nasional merujuk pada organisasi politik yang didirikan berdasarkan kesamaan tujuan dan aspirasi untuk melindungi kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik nasional memiliki cakupan yang lebih luas daripada partai politik lokal dan bertujuan untuk membangun negara secara bersama.³⁹

³⁸ Hajad, V., & Susetiawan, S. (2022). Diffusion of Ideology and Role of Local Party Control to Understand Aceh Post-War. *Journal of Government and Civil Society*. Hlm.1

³⁹ Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hlm.2

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh. Sehingga, mulailah lahir partai – partai politik lokal, yang pada saat itu berjumlah 20 partai politik lokal ditahun 2008. Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi seperti pemeriksaan persyaratan oleh Kemenkumham kantor wilayah Aceh serta kelayakan untuk mengikuti kontestasi pemilu oleh pihak KPU, akhirnya partai yang dapat mengikuti pemilu ditahun 2009 hanyalah 6 partai saja yakni Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Daulat Aceh (PDA). Maka, sejak pemilu tahun 2009 hingga 2024, terhitung sudah 4 kali keikutsertaan parlok Aceh dalam pemilu.⁴⁰

Dari jumlah parlok yang terbentuk sejak awal, terlihat bahwa antusiasme masyarakat Aceh dalam membentuk partai politik lokal sangat tinggi. Antusiasme ini juga terlihat pada setiap periode pemilu, yang mana ketika parlok yang bersangkutan tidak lulus *electoral threshold* yakni memperoleh kursi minimal lima persen di DPRD Provinsi, maka parlok akan berusaha memenuhi syarat yang diperlukan untuk mengikuti pemilu berikutnya.

Dengan demikian, terkait penelitian ini hanya akan fokus pada tiga partai politik lokal yaitu Partai Aceh (PA), Partai Darul Aceh (PDA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dikarenakan ketiga partai tersebut memiliki perwakilan terpilih di tingkat DPRA minimal dua kali dalam pemilihan umum.

⁴⁰ Redaksi. Sejarah Lahir Partai Politik Lokal di Aceh. <https://www.readers.id/read/sejarah-lahir-partai-politik-lokal-di-aceh/index.html> diakses pada 03/03/2024

1. Partai Aceh (PA)

Berdasarkan kesepakatan damai MoU Helsinki, salah satu poin pentingnya adalah pendirian partai politik lokal di Aceh. Oleh karena itu, Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Malik Mahmud, memberikan surat mandat kepada Tgk. Muhammad Yahya Mu'ad, SH, untuk mendirikan partai politik lokal pada 19 Februari 2007. Hal ini menghasilkan pembentukan partai yang dinamakan Partai GAM, yang tercatat dalam akta notaris H. Nasrullah, SH, pada 7 Juni 2007.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang lambang partai, Partai GAM mengubah lambang dan nama partainya menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Selanjutnya, berdasarkan persyaratan yang tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki serta kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan nama GAM, Partai GAM diminta untuk mengubah namanya kembali, sehingga berubah menjadi Partai Aceh. Hingga kini, Partai Aceh masih di pimpin oleh Muzakir Manaf yang juga menjadi aktor paling berpengaruh di Partai Aceh.⁴¹

⁴¹ Partai Aceh. Sejarah berdirinya partai Aceh. <https://www.partaia Aceh.org/profil.html> diakses pada 03/03/2024

Berikut visi dan misi Partai Aceh:

Tabel 3. Visi dan Misi Partai Aceh

VISI	MISI
Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.	Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra <i>Revolusi Party</i> menjadi citra <i>Development Party</i> dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Sumber : Visi & Misi dan AD-ART, <https://www.partaiaceh.org/visi-misi.html>

Visi dan misi yang diusung oleh Partai Aceh mengarah pada terwujudnya cita-cita rakyat Aceh dalam menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama, dan negara serta untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata. Dengan mengkampanyekan hal tersebut, pada pemilu pertamanya di tahun 2009, Partai Aceh mampu menjadi partai pemenang di Aceh dengan perolehan 33 kursi. Berikut perolehan suara Partai Aceh sejak pemilu 2009:

Tabel 4. Perolehan Kursi DPR Aceh Partai Aceh Pemilu (2009,2014,2019, dan 2024)

Tahun	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
2009	1.007.123	33
2014	847.956	29
2019	262.109	18
2024	400.047	20

Sumber : KPU

Dalam empat periode pemilu, menggambarkan perjalanan yang fluktuatif bagi Partai Aceh dalam hal perolehan suara dan kursi sepanjang. Dari tahun 2009 hingga 2019, terjadi tren penurunan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh. Namun, pada pemilu terbaru tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan dalam perolehan kursi di parlemen, yang menandakan upaya pemulihan dan perbaikan yang mungkin dilakukan oleh partai tersebut.

2. Partai Darul Aceh (PD Aceh)

Partai ini merupakan hasil transformasi dari Partai Daerah Aceh melalui proses MURALUB di Takengon, Aceh Tengah, pada bulan September 2021. Transformasi ini dilakukan sesuai dengan persyaratan Electoral Threshold atau Ambang Batas bagi partai lokal yang tidak memenuhi jumlah kursi DPRA untuk membentuk satu fraksi. Partai Darul Aceh merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Aceh yang didirikan pada tahun 2007 oleh sejumlah ulama dalam sebuah pertemuan di Hotel Rasamala, Banda Aceh, setelah MoU Helsinki 2005. Diinisiasi oleh Alm. Abu Ibrahim Bardan (Abu Pantan) dan beberapa ulama lainnya, Partai Daulat turut serta dalam pemilihan umum tahun 2009. Saat ini, PDA dipimpin oleh Tgk. H. Muhibbusabri A Wahab, yang merupakan salah satu putra dari ulama terkemuka Aceh, Abu Wahab Seulimum. Tgk. H. Muhibbusabri A Wahab pernah menjabat sebagai anggota DPRA selama 2 periode, dan juga merupakan tokoh politik berpengaruh di PDA..⁴²

⁴² Partai Darul Aceh, Sejarah, <https://www.partaidarulaceh.id/sejarah/> diakses pada 13/01/2024

Berikut Visi dan Misi PDA

Tabel 5. VISI & MISI PDA

VISI dan Misi PDA
Terwujudnya masyarakat ACEH yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia dan akhirat.

Sumber : Visi Misi, <https://www.partaidarulaceh.id/visi-misi/>

Mengacu pada visi dan misi yang mencakup berbagai aspek penting seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengusung ideologi nasionalis dan islamisme, sehingga partai ini pada pemilu pertamanya di tahun 2009, mampu memperoleh 1 kursi di DPRA. Berikut perolehan suara PDA sejak pemilu 2009:

Tabel 6. Perolehan Kursi DPRA Partai Darul Aceh Pemilu (2009, 2014, 2019 dan 2024)

Tahun	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
2009	39.706	1
2014	10.169	1
2019	21.262	3
2024	8.170	1

Sumber: KPU

Sejak pemilu tahun 2009 hingga 2014, PDA mampu mendapatkan satu kursi di parlemen dalam setiap periodenya. Namun, terjadi perubahan tren di tahun 2019, PDA berhasil meningkatkan perolehan kursinya menjadi tiga. Meski demikian, di pemilu terbaru tahun 2024, jumlah kursi yang diperoleh kembali ke posisi awal yakni hanya memenangkan satu kursi.

3. Partai Nanggroe Aceh (PNA)

Partai ini dikenal dengan nama Partai Nanggroe Aceh atau disingkat PNA, didirikan di Banda Aceh pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. Sebelum tahun 2017, partai ini dikenal sebagai Partai Nasional Aceh. PNA mulai berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Saat ini, PNA dipimpin oleh drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc, yang merupakan mantan gubernur Provinsi Aceh selama 2 periode, yakni 2007–2012 dan 2017–2018, juga menjadi aktor politik paling berpengaruh di PNA, termasuk istrinya Darwati Abdul Gani.⁴³

Tabel 7. Visi dan Misi PNA

VISI	MISI
Partai Nanggroe Aceh (PNA) bertujuan untuk memimpin perjuangan perubahan dengan menguasai Struktur Pemerintah baik Legislatif maupun Eksekutif di semua level dan tingkatan di Provinsi Aceh. Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga akan menempatkan diri sebagai kiblat dan konsepsi kehidupan rakyat di Aceh.	<ol style="list-style-type: none">1. Perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat di Aceh dalam Kedamaian yang bebas dan ketakutan terhadap masa depan.2. Perwujudan partisipasi seluruh potensi Rakyat Aceh dalam menciptakan Pemerintahan yang Demokratis, Amanah, Efektif, Efisien dan berwibawa yang menghormati nilai2 kemanusiaan.3. Perwujudan tatanan masyarakat yang memiliki daya saing Global yang tetap menghormati nilai ke-acehan dan nilai Ke-Islaman.

Sumber : Visi & Misi. <https://dpwpnabandaaceh.or.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>

⁴³ Partai Nanggroe Aceh, Sejarah PNA, <https://dpwpnabandaaceh.or.id/tentang-kami/sejarah-partai/> diakses pada 13/01/2024

PNA dalam hal ini berkomitmen mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, kesetiakawanan, kesetaraan, kerakyatan dan kebebasan yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan jati diri ke-Aceh-an dengan berpegang pada ideologi sosialisme, demokrasi dan *religious* mampu menjadikannya salah satu partai politik lokal yang sukses meraih kursi di legislatif maupun eksekutif. Berikut perolehan suara PNA sejak pemilu 2014:

Tabel 8. Perolehan Kursi DPR Aceh Pemilu (2014, 2019, dan 2024)

Tahun	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
2014	16.350	3
2019	61.973	6
2024	9.380	1

Sumber : KPU

Berbeda dengan dua partai politik lokal sebelumnya, Partai Nanggroe Aceh (PNA) baru memasuki panggung pemilihan umum pada tahun 2014 dengan meraih dukungan sebanyak 16.350 suara, yang mengantarkannya meraih tiga kursi di parlemen. Selanjutnya, pada tahun 2019, PNA mengalami peningkatan yang signifikan dalam perolehan suara, mencapai angka 61.973 suara, yang berujung pada perolehan enam kursi di parlemen. Namun, pada pemilu 2024, terjadi penurunan jumlah suara yang menyebabkan partai ini hanya mendapatkan 1 kursi di parlemen. Faktor internal dan eksternal dapat menjadi penyebab terjadi tren penurunan tersebut, sehingga diharapkan perolehan ini menjadi pendorong bagi partai untuk melakukan introspeksi, menyusun ulang strategi, dan membangun kembali hubungan dengan basis pemilih.

4.1.2 Latar Belakang Gen-Z dan Persepsi terhadap Partai Politik Lokal

Generasi Z dalam penelitian ini merujuk kepada individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2007, atau yang berusia 26 sampai 17 tahun dan telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Latar belakang generasi Z yang menjadi subjek penelitian ini bervariasi, di antaranya organisatoris, kelompok difabel, komunitas hobi, *enterpreneur* muda, siswa sekolah keagamaan, siswa sekolah umum, dan politisi muda.

Dari ketujuh latar belakang tersebut secara umum terdapat 2 bentuk perspektif, yakni respon positif dan respon negatif.

1. Respon Positif

a. Organisatoris

Kelompok organisatoris terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi yang berbasis di Aceh Besar, dan tergabung dalam anggota Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB), menganggap bahwa keberadaan partai lokal penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh. Salah satu aspek yang dianggap penting yakni dalam mempertahankan dana otonomi khusus, sebagai salah satu bentuk representasi dan keadilan bagi provinsi Aceh. Oleh karena itu, HIMAB percaya bahwa partisipasi aktif dalam mendukung parlok merupakan suatu langkah strategis untuk mempertahankan keistimewaan dan kedaulatan provinsi Aceh. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota HIMAB.

“Namanya partai lokal pasti akan lebih paham mengenai keadaan di Aceh sendiri. Dan seperti yang kita tahu bahwa dana otsus akan habis ditahun 2027 nanti, maka perlu kehadiran parlok di parlemen untuk memperjuangkannya lagi, jangan sampai dana otsus ini tidak diperpanjang”.⁴⁴

Bagi kelompok ini, tokoh politik lokal yang paling terkenal di antara ketiga parlok yakni Muzakir Manaf dari Partai Aceh dan Irwandi Yusuf dari Partai Nanggroe Aceh. Keduanya dikenal karena peran penting mereka dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta pengalaman mereka dalam pemerintahan. Sedang, untuk PDA kelompok ini tidak tahu ada siapa tokoh populer di dalamnya.

Perspektif kelompok organisatoris ini juga tidak terlepas dari konteks lingkungan organisasinya serta latar belakangnya sebagai mahasiswa. Lingkungan mereka cenderung aktif dalam mengikuti perkembangan politik dan tidak jarang membahas isu-isu politik. Melalui pengalaman ini, mereka secara aktif terlibat dalam pendidikan politik, baik melalui interaksi di lingkungan organisasi maupun di kampus. Dengan demikian, eksposur yang mereka terima dapat membentuk pandangannya terhadap partai politik lokal yang ada di Aceh.

b. Politisi Muda Parlok R - R A N I R Y

Politisi muda parlok melihat partai lokal sebagai kearifan lokal yang harus di jaga dan menjadi *platform* untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Seperti pernyataan salah satu politisi muda parlok, berikut:

⁴⁴ Wawancara dengan Mussadiq anggota HIMAB, Pada Sabtu 20 Januari 2024

“Kearifan lokal yang ada di Aceh itu salah satunya adalah partai lokal, bergabung dengan partai lokal sama dengan menjaga kearifan lokal Aceh. Dan parlok menjadi wadah untuk kita memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh.”

Dalam konteks ini, ia juga menegaskan bahwa generasi muda Aceh perlu terlibat aktif dalam politik, mengingat Aceh merupakan daerah yang pernah mengalami konflik panjang. Ketidakpedulian dengan kondisi politik yang ada di Aceh, maka tidak menutup kemungkinan konflik itu akan terjadi kembali.⁴⁵

2. Respon Negatif

a. Kelompok Difabel, Komunitas Hobi dan *Enterpreneur* Muda

Kelompok difabel, komunitas hobi dan enterpreneur muda memiliki perspektif yang sama, bahwa secara umum efektivitas partai politik lokal di Aceh terlihat kurang optimal, terutama dengan meningkatnya jumlah partai politik yang berdiri, sehingga memunculkan berbagai kelompok baru dengan kepentingannya masing – masing. Dalam hal ini juga, ketiga kelompok menganggap bahwa, ketika kinerja parlok belum dirasakan langsung, maka keefektifan parlok dianggap belum optimal.

“Sebenarnya partai politik lokal yang ada di Aceh ini tidak terlalu efektif, karena kebijakan dari parlok itu sendiri tidak berdampak langsung bagi kami selaku pelaku usaha”.⁴⁶

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh kelompok difabel yang tergabung dalam organisasi *Children and Youth Disabilitas for Change* (CYDC) dan komunitas hobi (*skateboard* dan *surfing*). Adapun tokoh partai politik dari

⁴⁵ Wawancara dengan Agam politisi muda PA. Pada Rabu 31 Januari 2024

⁴⁶ Wawancara dengan aksyal Muliasa, Pengusaha konveksi. Pada Senin, 29 Januari 2024

ketiga parlok yang terkenal di kalangan kelompok tersebut yakni Muzakir Manaf (PA), yang dikenal karena pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan ketua KONI Aceh dua periode. Selanjutnya, Irwandi Yusuf (PNA) yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh dua periode. Sedang di PDA tidak ada tokoh yang familiar di kalangan kelompok tersebut.

Kelompok – kelompok ini juga tidak terlalu menunjukkan ketertarikan terhadap isu politik atau partai. Ketika ditanyakan mengenai perspektif parlok di Aceh, mereka akan menjawab sesuai yang dilihat dan dirasakan saja. Dan bagi kelompok ini, partai politik lokal itu tidak perlu terlalu banyak, agar dapat fokus pada satu tujuan dan satu kepentingan dalam mensejahterakan rakyat Aceh.

b. Siswa Sekolah Umum (SLTA Sederajat)

Secara keseluruhan, pemahaman para siswa mengenai partai lokal di Aceh terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada pandangan siswa sekolah umum terhadap partai lokal, para siswa menganggap bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak sekuat partai politik nasional yang mereka kenal selama ini.

“Partai politik lokal di Aceh harusnya lebih eksis dibanding partai politik nasional, karena berada di wilayahnya sendiri. Ini membuktikan, bahwa partai lokal kurang mampu menarik suara rakyat Aceh, terutama bagi kami pemilih pemula.”⁴⁷

Para siswa di sekolah umum merasa bahwa partai lokal tidak begitu populer seperti partai nasional. Di sisi lain, dari segi tokoh politik yang berasal dari ketiga

⁴⁷ Wawancara dengan Arini, Siswa sekolah umum. Pada, Jum’at 26 Januari 2024

partai lokal, hanya Muzakir Manaf (PA) dan Irwandi (PNA) yang dikenal oleh para siswa dikarenakan keduanya pernah menjabat di pemerintahan sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh, sementara tidak ada tokoh politik dari PNA yang terkenal di kalangan mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan para siswa terhadap partai politik lokal.

c. Siswa Sekolah Keagamaan/Dayah (SLTA Sederajat)

Pandangan santri di Aceh menunjukkan bahwa partai politik lokal sering kali hanya memanfaatkannya sebagai alat kampanye untuk memperoleh suara dan simpati masyarakat. Terutama partai yang mengusung agenda keagamaan dan menjanjikan peningkatan kesejahteraan pesantren. Selain itu, keterbatasan pengetahuan santri tentang partai politik lokal juga menjadi faktor, karena larangan penggunaan telepon genggam di lingkungan pesantren mengakibatkan minimnya pembaruan informasi mengenai hal tersebut.

“Kami ini hanya dijadikan bahan kampanye saja, banyak yang datang ke dayah, katanya untuk silaturahmi, tapi nyatanya sekalian kampanye juga. Kami juga tidak terlalu banyak tahu tentang partai lokal itu, sebab di dayah menggunakan *handphone* itu dilarang. Jadi, kami cuma bisa *update*, ketika nanti sudah libur dan pulang kerumah”.⁴⁸

Terkait pernyataan tersebut tidak terlepas dari daerah Aceh yang kental akan keagamaannya, sehingga mempengaruhi banyak partai lokal untuk mengadopsi *religius* sebagai ideologi partai. Dengan demikian, untuk mendapatkan dukungan masyarakat, partai juga cenderung menggunakan lembaga keagamaan sebagai salah

⁴⁸ Wawancara dengan Fadiel Ikhsan Santri Dayah Mulia. Pada, Rabu 24 Januari 2024

satu sasaran kampanyenya. Hal ini memiliki dampak persepsi yang dimiliki santri terhadap partai politik lokal di Aceh.

Di sisi lain, dari segi tokoh politik yang berasal dari ketiga partai lokal, hanya Muzakir Manaf (PA) dan Irwandi (PNA) yang dikenal oleh para santri di karenakan keduanya pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, sementara tidak ada tokoh politik dari PNA yang familiar di kalangan mereka. Selain itu, kurangnya pendidikan politik yang diterima oleh para santri juga berkontribusi pada keterbatasan pengetahuan mereka tentang partai politik lokal yang beroperasi di Aceh.

d. Politisi Muda Parnas

Politisi muda dari partai nasional memiliki pandangan negatif terhadap partai politik lokal. Seperti yang ungkapkan oleh salah satu politisi muda dari Partai Amanat Nasional berikut :

“Saya bergabung dengan salah satu partai nasional itu ditahun 2022, salah satu alasannya partai nasional memiliki relasi yang lebih luas di semua wilayah yang ada di Indonesia sedang parlok ruang lingkup yang itu itu saja, ditambah *image* parlok yang buruk karena kasus korupsi.”⁴⁹

Politisi muda parnas memiliki persepsi bahwa partai politik lokal dalam beberapa tahun terakhir memiliki citra yang buruk, terutama karena salah satu pemimpin parlok terjerat dalam kasus korupsi dan beranggapan bahwa ketika bergabung dengan partai lokal akan mempersempit jaringan atau tidak memiliki cakupan relasi yang lebih luas. Disisi lain terkait tokoh politik dari ketiga parlok

⁴⁹ Wawancara dengan M.Anis Politisi muda PAN. Pada, Selasa 30 Januari 2024

yang terkenal di kalangan politisi muda hanya Muzakir Manaf (PA) dan Irwandi Yusuf (PNA) dikarenakan keduanya pernah menjabat di pemerintahan, sementara untuk tokoh politik PDA tidak ada yang familiar di kalangan politisi muda parnas.

Pasalnya, sebagian besar informan dalam penelitian ini terutama yang berlatar belakang siswa/i, santri, komunitas hobi, kelompok difabel serta *entrepreneur*, mereka memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai partai politik lokal. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik di kalangan generasi Z, yang berdampak pada persepsi mereka tentang partai politik lokal di wilayah Aceh. Terkhusus bagi kelompok siswa/i yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang perbedaan antara partai politik lokal dan partai politik nasional. Bagi mereka, definisi partai politik lokal adalah ketika suatu partai mencantumkan nama Aceh dalam partainya, tanpa memahami secara mendalam peran serta visi misi partai tersebut dalam konteks politik lokal.

Sementara itu, sebagian dari informan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa partai politik lokal yang paling terpatrit yakni Partai Aceh. Sedang, untuk Partai Darul Aceh, Partai Nanggroe Aceh, atau partai politik lokal lainnya yang ada di Aceh kurang familiar di kalangan mereka. Hal ini disebabkan karena pemahaman politik yang terbatas di kalangan generasi Z. Kurangnya pemahaman ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan generasi muda, khususnya di Aceh, guna memperkuat demokrasi dan partisipasi politik yang lebih baik di masa depan.

4.2 *Political Trust* Generasi Z terhadap Partai Politik Lokal di Aceh

Tingkat kepercayaan pemilih pemula terhadap partai politik lokal Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PDA), dan Partai Nanggroe Aceh (PNA), pada umumnya cenderung kurang percaya atau terdapat keragu-ragu terhadap partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan empat indikator dalam mengukur *political trust* generasi Z terhadap lembaga politik dalam hal ini partai politik lokal, yakni : (1) *Competence* (Kinerja); (2) *Care* (Keperdulian); (3) *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen); dan (4) *Reliability* (Keandalan).

Dari keempat indikator tersebut, *Competence* (kinerja) dan *Care* (keperdulian) tampaknya menjadi yang paling dominan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai politik lokal di Aceh. Ketika informan dapat merasakan atau melihat kinerja yang positif dan kepedulian yang diberikan oleh partai politik lokal kepada seluruh lapisan masyarakat, serta dapat memenuhi hak minoritas. Maka hal ini akan mempengaruhi dalam memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

1. *Competence* (Kinerja)

Competence merupakan sesuatu yang menunjukkan *strong performance* yang berkaitan dengan kemampuan dan kinerja pihak politik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Ketika sebuah partai politik dapat membuktikan kemampuannya dalam hal-hal tersebut, mereka cenderung membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam

memenuhi harapan masyarakat dapat menghilangkan kepercayaan politik pada partai tersebut.⁵⁰

Kinerja suatu partai politik dianggap sebagai indikator utama oleh para informan dalam menilai efektivitas dan relevansi partai politik lokal di Aceh, Pasalnya dari ketiga partai yang menjadi fokus dalam penelitian ini, beberapa informan hanya mengetahui kinerja dari Partai Aceh, meski kinerja tersebut tidak dirasakan langsung oleh informan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Aceh Besar.

"Dari ketiga partai politik lokal yakni PA, PDA, dan PNA, terlihat bahwa kinerja terkhusus dari Partai Aceh lebih mencolok. Kinerja nyata yang dilakukan oleh Partai Aceh sangat membantu masyarakat, seperti terlihat dalam inisiatif pembangunan rumah bagi kaum dhuafa. Sebelumnya, kaum dhuafa ini belum memiliki rumah, namun berkat Partai Aceh mereka kini memiliki tempat tinggal".⁵¹

Pernyataan ini mencerminkan pandangan Mussadiq tentang kinerja partai politik lokal di Aceh, khususnya Partai Aceh, dalam membantu masyarakat melalui inisiatif konkret seperti pembangunan rumah bagi kaum dhuafa. Seperti informasi pada media berikut :

⁵⁰ Van der Meer, T. W. (2017). Political trust and the "crisis of democracy". In Oxford research encyclopedia of politics. Hlm 5

⁵¹ Wawancara dengan Mussadiq anggota HIMAB, pada Sabtu 20 Januari 2024



Gambar 2. Berita ANTRACEH.com pada 04 Desember 2013

Dalam informasi tersebut, Gubernur Aceh saat itu, Zainai Abdullah, menyatakan bahwa pembangunan rumah untuk kaum dhuafa merupakan salah satu program pemerintahannya yang dipimpin bersama Wagub Muzakir Manaf, yang mana keduanya berasal dari Partai Aceh.

2. Care (Keperdulian)

Faktor kepedulian juga menjadi salah satu tolak ukur yang dipertimbangkan oleh para informan dalam mengevaluasi partai politik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa para informan tidak hanya mempertimbangkan pencapaian dan efektivitas sebuah partai dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga mengamati sejauh mana partai tersebut memiliki perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, memenuhi hak minoritas serta aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa partai politik lokal umumnya dianggap kurang memberikan perhatian yang memadai oleh

mereka. Namun pandangan ini tidak berlaku bagi Partai Aceh, informan mengakui tingkat kepedulian Partai Aceh lebih terbukti dibandingkan dengan partai politik lokal lainnya yakni Partai Darul Aceh (PDA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Berikut pernyataan salah satu informan dari kelompok disabilitas.

“Partai Aceh selalu melibatkan kami di setiap acara atau *event-event* umum yang mereka selenggarakan. Kami merasa keberadaan kami sangat diperhatikan”.⁵²

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Partai Aceh secara konsisten melibatkan kelompok difabel dalam acara atau *event* umum yang diselenggarakan oleh Partai Aceh. Berikut beberapa informasi media sebagai pendukung hasil wawancara dengan para informan:



Gambar 3. Berita SERUNEE. Partai Aceh Buka Puasa Bersama Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim dipublish pada 10 Juni 2018

⁵² Wawancara dengan Avisena anggota *Children and Youth Disabilities for Change – CYDC*, pada Rabu, 24 Januari 2024



Gambar 4. Berita Dialeksis. Yang diublihs pada 5 Juni 2022

Kepedulian Partai Aceh tercermin ketika partai ini melibatkan kelompok difabel dalam acara publik yang diselenggarakan, melakukan kerja sama dengan pengusaha muda dibidang konveksi dalam pembuatan seragam partai, Ini juga mencerminkan strategi Partai Aceh dalam mendukung pengusaha lokal sebagai bagian dari upaya untuk memajukan perekonomian daerah. Sedangkan PNA dan PDA sejauh ini belum melakukan kerja sama dengan *entrepreneur* muda yang dimaksud. Sementara itu, bagi komunitas hobi yang merasakan perubahan positif pada lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) wilayah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf selama 2 priode.

Dari kedua indikator yang mempengaruhi tersebut, terdapat pula dua indikator lemah, terlihat dalam perspektif generasi Z yaitu *accountability* (akuntabilitas atau komitmen) dan *reliability* (keandalan). Kedua indikator ini dikatakan lemah, sebab generasi Z cenderung tidak mengetahui informasi lebih lanjut mengenai indikator tersebut.

1. *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen)

Indikator ini mencakup kemampuan dan kewajiban partai politik untuk bertanggung jawab atau keamanan atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang mereka layani.⁵³ Akuntabilitas yang jelas dapat membantu menciptakan kepercayaan masyarakat. Pasalnya hampir semua informan tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tingkat akuntabilitas atau komitmen dari tiga partai politik lokal, yaitu PA, PDA dan PNA. Alasan di balik kurangnya pemahaman ini hampir sama, yakni karena minimnya informasi yang tersedia kepada mereka mengenai akuntabilitas atau komitmen yang dimiliki oleh partai-partai tersebut. Berikut pernyataan dari salah satu informan yang berasal dari kelompok komunitas muda (*skateboard*).

“Jujur saja, kalau mengenai politik atau partai lokal saya kurang tahu, kami juga di sini bersama komunitas kurang tertarik dengan pembahasan tentang politik, kecuali partai tersebut berdampak positif bagi kami. Jadi, mengenai akuntabilitas parlok tidak terlalu tahu, parlok mana yang lebih Amanah. Sebab, kami juga tidak merasakan langsung bentuk akuntabilitas itu sendiri”.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa informan cenderung kurang tertarik dengan politik atau partai lokal. Mereka lebih fokus pada hal-hal lain yang dianggap lebih relevan bagi komunitas mereka. Namun, mereka juga menyatakan bahwa jika ada partai lokal yang dapat memberikan dampak positif bagi mereka, mereka akan mempertimbangkan dukungannya. Dalam hal akuntabilitas dan

⁵³ Van der Meer, T. W. (2017). Political trust and the “crisis of democracy”. In Oxford research encyclopedia of politics. Hlm 5

⁵⁴ Wawancara dengan Teuku Ilham komunitas muda (*skateboard*). Pada, Selasa 23 Januari 2024

keamanahan partai lokal, mereka mengaku kurang memiliki pemahaman yang mendalam karena kurangnya pengalaman langsung yang dirasakan dalam hal tersebut.

Sementara itu, politisi muda parlok mengakui bahwa terkait akauntabilitas atau komitmen partai dalam menjalankan fungsinya masih kurang. Seperti pernyataan politisi muda PDA berikut :

“Sejauh ini komitmen PDA dalam menjalankan fungsinya sebagai partai masih belum optimal. Juga dalam hal menjalankan amanah di parlemen misalnya, karena jumlah kursi terbilang sedikit, sehingga tidak terlalu mempengaruhi keputusan di parlemen”.⁵⁵

Hingga saat ini, keterlibatan Partai Darul Aceh dalam menjalankan perannya sebagai partai masih belum mencapai tingkat optimal. Ini juga berlaku dalam hal pelaksanaan tanggung jawab di parlemen, di mana jumlah kursi yang mereka miliki terbilang sedikit sehingga pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas.

Pernyataan tersebut, berbeda dengan politisi muda dari Partai Aceh. Terkait akuntabilitas atau komitmen, baginya Partai Aceh telah berupaya dalam melakukan perannya sebagai partai politik.

“Terkait akuntabilitas sebenarnya, Partai Aceh seperti berjuang sendiri dalam merealisasikan butir – butir MOU, yang mengakibatkan banyak kebijakan – kebijakan yang tidak optimal, hal ini juga yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Bagi saya, partai politik lokal lain tidak bersungguh – sungguh dalam menjalankan amanat rakyat Aceh.”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan politisi muda PDA Rifaldi Mufti, pada Selasa, 30 Januari 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Agam anggota Partai Aceh, Rabu 31 Januari 2024

Menurut politisi muda PA, Partai Aceh terlihat seperti berjuang sendiri dalam merealisasikan butir-butir MOU, yang mengakibatkan banyak kebijakan yang dihasilkan tidak optimal. Hal ini juga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut menurun dan menganggap bahwa Partai Aceh tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai partai. Agam menyoroti bahwa partai politik lokal lainnya, di luar Partai Aceh, tidak menunjukkan kesungguhan yang sama dalam menjalankan amanat rakyat Aceh.

Sedang dari politisi muda PNA, menyatakan bahwa semenjak pemimpin partai tersandung kasus korupsi, banyak anggota PNA kehilangan arah dan dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai tidak terealisasi dengan baik.

2. Reliability (Keandalan)

Keandalan ini dapat diukur melalui sejumlah faktor, termasuk seberapa konsisten partai tersebut dalam menyampaikan pesan politiknya, sejauh mana partai tersebut mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip ideologisnya, dan seberapa cepat sebuah partai dapat merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Terkait keandalan suatu partai, sayangnya hampir seluruh informan tidak mengetahui hal tersebut, menyebabkan peneliti harus menggali informasinya dari politisi muda yang terafiliasi dengan Partai Aceh (PA), Partai Darul Aceh (PDA), dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

“Mengenai keandalan partai, saya pikir Partai Aceh tidak perlu diragukan lagi, mengingat perjalanan sejarah yang mana GAM berevolusi dari perjuangan militer menjadi perjuangan politik yang melahirkan Partai Aceh.

Salah satunya adalah Anggaran otsus merupakan hasil perjuangan GAM yang memikirkan nasib rakyat Aceh hingga sekarang Partai Aceh masih konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat”.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Partai Aceh dianggap memiliki keandalan yang tinggi, terutama karena sejarah perjalanan partai tersebut yang bermula dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian bertransformasi dari perjuangan militer menjadi perjuangan politik, dan akhirnya melahirkan Partai Aceh. Salah satu contohnya adalah otonomi khusus (otsus), yang dipandang sebagai hasil perjuangan dari GAM dan dipikirkan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Partai Aceh dianggap konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh, sehingga keandalannya tidak diragukan lagi.

Pernyataan ini juga di dukung dengan adanya pandangan dari narasumber lain yakni informan yang berlatar belakang organisator, yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Aceh Besar. Bagi mereka secara umum Partai Aceh telah berkontribusi besar untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan politisi muda dari Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ideologi yang dimiliki oleh PNA, yaitu sosial demokrasi religius, dipandang sebagai jalan tengah antara liberalisme dan kapitalisme di sisi kanan, serta sosialisme di sisi kiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ideologi tersebut tidak dijalankan dengan baik.

⁵⁷ Wawancara dengan Agam anggota Partai Aceh, Rabu 31 Januari 2024

“Terkait dengan keandalan partai, pada masa awal Irwandi menjadi gubernur, beliau adalah penggagas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang muncul dari ideologi Sosial Demokrasi (Sosdem) itu sendiri. Program ini kemudian diperluas menjadi JKA Plus pada priode yang kedua. Namun, sejak beliau terjerat kasus korupsi, anggota partai, baik di pemerintahan maupun di parlemen, menjadi bingung mengenai arah kebijakan yang harus diperjuangkan, yang kemudian menimbulkan gesekan internal. Sebagai contoh, di parlemen, kita memiliki 6 kursi, para politisi ini tidak memahami regulasi yang harus diperjuangkan sesuai dengan ideologi Sosdem. sebab, politisi kita tidak semuanya memiliki literasi yang bagus”.⁵⁸

Pernyataan ini mencerminkan pandangan Affan tentang kompleksitas dalam menjalankan kebijakan partai politik terkait dengan keandalan dan konsistensi ideologi, terutama setelah terjadinya kasus kontroversial yang melibatkan pemimpin partai. Hal ini juga menyoroti pentingnya literasi politik bagi anggota partai politik untuk memahami dan memperjuangkan regulasi sesuai dengan ideologi partai.

Sedangkan dari politisi muda Partai Darul Aceh (PDA), beliau menyatakan bahwa terkait keandalan partai, informasi tidak dapat dibagikan secara terbuka karena mematuhi kode etik partai. Beberapa kali peneliti bertanya mengapa hal tersebut menjadi *sensitive*, namun ia juga tidak mau membahasnya. Bahkan ia sempat mengatakan, seharusnya pertanyaan penelitian dikirim via *WhatsApp* terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, agar jawaban pertanyaan dapat dipersiapkan sebelumnya.

“Mengenai keandalan partai saya tidak bisa terbuka dengan alasan kode etik partai, jadi pertanyaan ini bisa di skip saja. yang jelas partai kami memegang ideologi nasionalis dan islamisme”.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Affan Politisi Muda PNA, pada Jum’at, 26 Januari 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Politisi Muda PDA Rifaldi Mufti, pada Selasa, 30 Januari 2024

Berdasarkan pernyataan tersebut, informan penelitian menolak untuk memberikan informasi secara terbuka tentang keandalan partainya dengan alasan adanya kode etik partai yang mengikatnya. Namun, ia menekankan bahwa partainya memiliki landasan ideologi yang berakar pada prinsip nasionalisme dan islamisme, yang dianggapnya sebagai pilar-pilar utama dalam perjuangan politik yang dijalankan oleh partainya.

Maka, dapat disimpulkan bahwa, informan pemilih pemula memiliki pengetahuan terbatas tentang keandalan partai sedang Partai Aceh dianggap memiliki keandalan yang tinggi, sementara Partai Nanggroe Aceh (PNA) menunjukkan ketidaksesuaian dalam menerapkan ideologinya, dan Partai Darul Aceh (PDA) mengikuti kode etik partai sehingga enggan mengungkap informasi terkait keandalan partainya.

Dari empat indikator yang telah dijelaskan, Para informan dari latar belakang organisatoris, santri, siswa, dan politisi muda parnas cenderung lebih memahami dan mengamati kinerja (*competence*) suatu partai politik, sementara kelompok difabel, komunitas hobi, dan pengusaha muda cenderung lebih fokus pada aspek kepedulian (*care*) dari partai politik lokal, karena mereka memiliki pengalaman langsung yang memengaruhi pandangan mereka. Di sisi lain, politisi muda cenderung mengetahui akuntabilitas (*accountability*) dan keandalan (*reliability*) dalam mengevaluasi partai politik lokal. Dengan demikian, berbagai kelompok informan memiliki penekanan yang berbeda-beda terhadap aspek yang dianggap penting dalam penilaian terhadap partai politik lokal di Aceh.

4.3 Faktor penyebab terbentuknya *political trust*

Pembentukan kepercayaan politik di kalangan generasi Z menjadi faktor penting yang menjadi pijakan bagi partai politik lokal untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari generasi muda. Kepercayaan politik yang kuat di kalangan generasi Z merupakan landasan bagi partai politik lokal dalam upaya mereka untuk meraih simpati dan dukungan yang substansial dari kalangan pemilih muda.

Dalam penelitian ini, terdapat dua faktor yang membentuk *political trust*, yaitu rasional dan relasional. Secara umum, pembentukan kepercayaan politik generasi Z, faktor rasional cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan daripada faktor relasional. Kelompok-kelompok seperti difabel, komunitas hobi, pengusaha muda, siswa, dan politisi muda parnas cenderung lebih mengandalkan pertimbangan rasional dalam membentuk kepercayaan politik mereka. Di sisi lain, kelompok seperti organisatoris, santri, dan politisi muda parlok lebih condong kepada faktor relasional.

4.3.1 Faktor rasional.

Faktor rasional bersifat strategis dan penuh perhitungan dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan

profesional. Faktor rasional dalam kepercayaan mencakup pertimbangan logis, penilaian objektif, dan proses berpikir yang dapat dijelaskan secara rasional.⁶⁰

Faktor-faktor rasional yang muncul dan menjadi paling dominan ketika melakukan wawancara dengan para informan terkait pembentukan kepercayaan terhadap partai politik lokal, meliputi : (1) kinerja dan program partai politik; (2) rekam jejak partai politik; dan (3) media digital yang membentuk persepsi generasi Z terhadap partai politik lokal.

“Yang pasti, timbulnya kepercayaan politik terhadap sebuah partai tentu akan saya nilai berdasarkan kinerja partai, pola pikir partainya, serta keputusan yang diambil oleh partai-partai lokal tersebut. Sebagai anak muda, kita harus lebih selektif dalam menentukan di mana kita akan menaruh kepercayaan terhadap sebuah partai”.⁶¹

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa untuk mempercayai suatu partai politik, penting bagi individu, terutama generasi muda, untuk menilai kinerja partai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik tidak hanya bergantung pada identitas partai, tetapi juga pada tindakan konkret yang dilakukan oleh partai tersebut. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk melakukan evaluasi yang cermat sebelum memberikan kepercayaan politik kepada suatu partai.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat dari politisi muda partai nasional yang menyebutkan bahwa dalam membentuk kepercayaan politik penting

⁶⁰ Tranter, B & Skrbis, Z. (2009). Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders. *Australian Journal of Political Science*, Hlm.2

⁶¹ Wawancara dengan Aksyal Muliasa pengusaha konveksi, pada Senin, 29 Januari 2024

untuk mempertimbangkan program-program yang diimplementasikan oleh partai tersebut.

“Dalam membentuk kepercayaan politik, saya akan melihat program yang mengakar rumput dan menyentuh kalangan bawah tanpa adanya kepentingan di belakangnya”.⁶²

Politisi muda dari Partai Demokrat ini, menekankan pentingnya program-program yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama kalangan bawah, serta tidak memiliki motif kepentingan yang tersembunyi di baliknya. Dengan demikian, kedua pandangan ini menegaskan pentingnya kebijakan politik dan program-program partai yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat secara menyeluruh.

Faktor yang lain, seperti media digital juga menjadi pengaruh bagi generasi Z dalam membentuk kepercayaannya. Media digital dianggap bisa memengaruhi opini, nilai-nilai, dan pandangan dunia seseorang melalui representasi budaya, cerita-cerita, dan narasi yang disajikan. Misalnya, informasi yang menampilkan profil suatu partai tertentu dapat memengaruhi persepsi dan preferensi individu terhadap suatu partai. Seperti dalam pernyataan salah satu informan yang berlatar belakang sebagai seorang siswi :

“Media digital menjadi sumber informasi bagi kami yang tidak tahu tentang politik. sehingga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi kami terhadap suatu partai misalnya.”⁶³

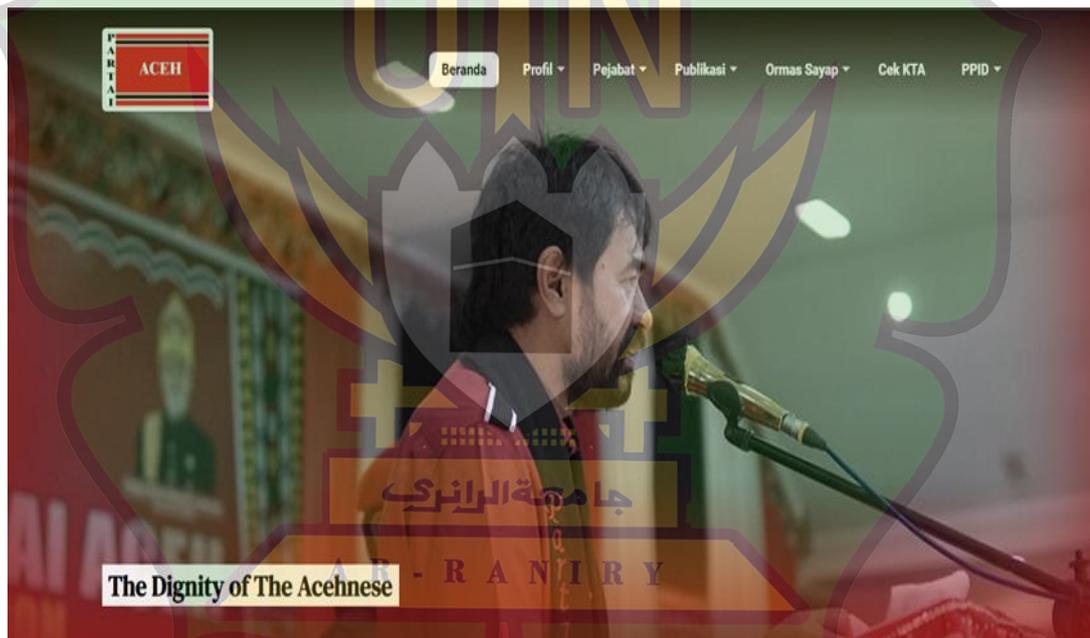
⁶² Wawancara dengan Putri Safira politisi muda Partai Demokrat, pada Sabtu, 03 Februari 2024

⁶³ Wawancara dengan Wulan Maisya Camal, siswa sekolah umum. Pada, Jum'at 26 Januari 2024

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa media digital berperan sebagai sumber informasi bagi mereka yang kurang mengerti tentang politik. Media digital membantu mereka untuk memahami isu-isu politik dan membentuk persepsi mereka terhadap partai politik tertentu. Dengan demikian, media digital memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan partai politik.

Berikut penampilan *platform website* resmi dari ketiga parpol :

1. Partai Aceh (PA)



Gambar 5. Website Resmi Partai Aceh

Selain menggunakan *website*, PA juga memanfaatkan media sosial berupa instagram, facebook, tiktok, youtube, dan twitter. Meski media sosial PA terbilang lengkap, namun tidak semuanya aktif digunakan. Hanya *website* resmi, Instagram, facebook dan youtube yang secara aktif diperbarui dengan postingan terkait Partai

Aceh, yang mana terlihat dari jumlah postingan mencapai ratusan dalam *platform* tersebut. Disisi lain, Partai Aceh juga mengintegrasikan semua *platform website* dan media sosialnya sehingga publikasi informasi partai dapat diakses secara terhubung, artinya PA meletakkan akses tautan (*link*) setiap media sosialnya pada deskripsi semua akunnya. Hal ini membentuk jejak digital yang konsisten bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Partai Aceh. Meskipun demikian, seharusnya pada *website* resmi Partai Aceh perlu adanya menu pencarian guna memudahkan dalam mencari informasi tertentu.

2. Partai Darul Aceh (PDA)



Gambar 6. Website Resmi Partai Darul Aceh

Tampaknya Partai Darul Aceh (PDA) belum sepenuhnya memanfaatkan potensi media sosial sebagai alat untuk memperkuat promosi dan eksposur partainya. Hal ini dapat diamati dari minimnya kegiatan yang dipublish oleh PDA di *platform* media digital yang mereka miliki, yakni terdiri dari : *website* resmi,

instagram, facebook, dan tiktok. Selain itu, terdapat beberapa menu pada situs *website* resmi mereka yang tidak berfungsi dengan optimal, yang dapat menghambat aksesibilitas dan kemudahan pengguna dalam mencari informasi terkait partai tersebut.

3. Partai Nanggroe Aceh (PNA)



Gambar 7. Website resmi DPW PNA Banda Aceh

Setelah diselidiki, terungkap bahwa Partai Nanggroe Aceh (PNA) bahkan tidak memiliki *platform website* resmi. DPP PNA hanya memiliki akun instagram dan facebook yang mana postingan terakhirnya di publish pada tahun lalu. Sehingga, segala informasi tentang partai ini hanya tersedia di *website* resmi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat kota Banda Aceh saja.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh telah berhasil mengintegrasikan *platform* media digitalnya dan menciptakan jejak digital yang konsisten bagi publik, namun tidak semua akun medianya optimal. Partai Darul Aceh (PDA) belum sepenuhnya memanfaatkan potensi media sosial dan situs *website* resmi mereka. Sedang, Partai Nanggroe Aceh (PNA) tidak memiliki *platform website* resmi dan partai ini hanya memiliki akun instagram dan facebook, namun tidak secara teratur memperbarui informasi atau kegiatan partai.

Kembali pada karakteristik generasi Z, penting untuk diingat bahwa mereka cenderung mencari informasi melalui *platform* media digital. Oleh karena itu, strategi yang efektif bagi partai politik adalah memanfaatkan potensi penuh media digital ini sebagai alat untuk menarik dukungan dari kalangan muda dengan catatan penggunaan media digital harus sesuai perkembangan. Sehingga, partai politik dapat meningkatkan visibilitas mereka di *platform* yang paling sering digunakan oleh generasi Z dan secara efektif berkomunikasi dengan mereka untuk mencapai tujuan politik mereka.

4.3.2 Faktor relasional

Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik, dan berbasis pada kebaikan seseorang. Faktor relasional dalam kepercayaan mencakup aspek-aspek yang terkait dengan

hubungan interpersonal dan interaksi sosial yang memainkan peran dalam membentuk dan memperkuat kepercayaan.⁶⁴

Faktor-faktor relasional yang muncul ketika melakukan wawancara terkait pembentukan kepercayaan terhadap partai politik lokal meliputi : (1) Personalitas pemimpin atau basis kepada kebaikan individu; (2) Hubungan sosial; dan (3) Lingkungan pendidikan. Ketiga faktor ini muncul dari wawancara dan analisis di lapangan dan ketiganya menunjukan faktor yang paling berpengaruh pula.

“Personalitas seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan politik. Sebagai contoh, kita bisa melihat sosok pemimpin di PA Muzakir Manaf, yang dulunya merupakan panglima GAM melakukan perjuangan di hutan. Hingga saat ini, beliau terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.”⁶⁵

Farhan menyampaikan pandangannya tentang pengaruh personalitas seorang pemimpin dalam membentuk kepercayaan politik. Sebagai contoh konkret, ia merujuk pada sosok pemimpin di PA Muzakir Manaf, yang sebelumnya merupakan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masih aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh hingga saat ini. Pernyataan ini juga sejalan dengan salah satu pendapat informan berikut:

"Partai politik lokal itu di urus oleh orang Aceh sendiri, baik secara pusat maupun wilayah, jadi lebih paham bagaimana keadaan daerahnya sendiri. di tambah personalitas pemimpin sangat berpengaruh karena dari pemimpin kita bisa menilai bagaimana ia mengarahkan partai yang dipimpinya".⁶⁶

⁶⁴ Tranter, B & Skrbis, Z. (2009). Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders. Australian Journal of Political Science, Hlm.2

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Farhan anggota HIMAB, pada Sabtu 20 Januari 2024

⁶⁶ Wawancara dengan Nabila Febridha anggota HIMAB, pada Sabti 20 Januari 2024

Hal ini menunjukkan adanya konteks hubungan sosial dalam kepercayaan politik. Karena kehadiran orang Aceh dalam mengelola partai lokal dapat mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan anggota partai dengan masyarakat setempat. Orang Aceh yang memimpin partai lokal dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh, sehingga dapat memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan antara partai politik dan masyarakat setempat. Pernyataan ini juga berlaku untuk semua partai politik lokal yang ada di Aceh. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, informan yang berlatar belakang santri, mengatakan bahwa latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan politiknya.

“Kami dipesantren diajarkan untuk patuh terhadap ulama dan guru. Bagi kami ajaran ulama atau guru yang terbaik. Maka itu perannya dalam hal membentuk kepercayaan kami akan sangat berpengaruh”.⁶⁷

Pernyataan tersebut mencerminkan pengaruh yang besar dari pendidikan agama yang diterima oleh siswa di yayasan pesantren terhadap pembentukan kepercayaan mereka. Sebagai santri, siswa diajarkan untuk mematuhi dan menghormati ulama dan guru mereka secara taat, sehingga peran ulama dan guru dalam membentuk kepercayaan siswa sangatlah signifikan.

Santri cenderung membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap politik, masyarakat, dan kehidupan secara umum berdasarkan ajaran dan arahan dari ulama dan guru mereka di pesantren. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa latar belakang

⁶⁷ Wawancara dengan Siswa Yayasan Dayah Mulia Muhammad Haikal, pada Rabu, 24 Januari 2024

atau lingkungan dari informan sangat mempengaruhi dalam pembentukan kepercayaan terhadap partai politik lokal.

Secara keseluruhan, informan yang berlatar belakang seperti pengusaha muda, politisi muda, siswa/i, kelompok hobi, dan kelompok difabel, cenderung lebih mempertimbangkan faktor-faktor rasional dalam membentuk kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh. Mereka menilai bahwa kinerja dan program partai, rekam jejak partai, serta media digital memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepercayaan politik. Sementara itu, informan yang memiliki latar belakang organisatoris dan santri cenderung lebih mengutamakan faktor-faktor relasional. Mereka percaya bahwa hubungan sosial, personalitas pemimpin partai, dan latar belakang pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kepercayaan politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor rasional cenderung memiliki dominasi yang lebih besar dan dianggap lebih berpengaruh dalam membentuk kepercayaan politik generasi Z.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan terkait tingkat kepercayaan politik dan terbentuknya kepercayaan politik terhadap partai politik lokal adalah sebagai berikut :

1. Persepsi gen Z terhadap parlok terbagi ke dalam 2 bentuk, yakni respon positif dan respon negatif. Respon positif melibatkan informan dari latar belakang kelompok organisatoris dan politisi muda parlok. Sementara, respon negatif ditunjukkan oleh informan kelompok difabel, komunitas hobi, *enterpreneur* muda, santri, siswa sekolah umum, dan politisi muda parnas. Dengan demikian, kecenderungan persepsi generasi Z terhadap partai politik lokal lebih banyak berada pada sisi negatif daripada positif. Berdasarkan keempat indikator, kepercayaan politik generasi Z paling banyak dipengaruhi oleh indikator *competence* (kinerja) dan *care* (kepedulian) dibanding dua indikator lainnya yaitu *Accountability* (akuntabilitas atau komitmen) dan *Reliability* (Keandalan). Ditambah lagi, generasi Z hanya familiar terhadap Partai Aceh (PA) saja dibanding PDA dan PNA atau partai politik lokal lainnya.
2. Faktor rasional lebih kuat dalam membentuk tingkat kepercayaan generasi Z terhadap partai politik lokal pada informan yang berlatar belakang seperti *enterpreneur* muda, politisi muda, siswa/i, kelompok hobi, dan kelompok difabel. Salah satunya terkait media sosial, Media sosial menjadi alat kampanye yang efektif bagi partai. Partai Aceh menjadi partai yang paling efektif dalam penggunaan sosial media. Di banding dengan dua parlok lainnya yakni PNA dan PDA. Parlok tersebut belum sepenuhnya

memanfaatkan potensi media sosial dan situs *website* resmi mereka dan tidak secara teratur memperbarui informasi atau kegiatan partai. Sementara itu, hanya pada kelompok organisatoris dan santri saja yang lebih mengutamakan faktor-faktor relasional.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Partai politik lokal perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi mengenai kinerja, dan komitmen serta keandalan partai kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula. Informasi yang lebih jelas dan mudah diakses dapat membantu membangun kepercayaan politik yang lebih kuat.
2. Partai politik lokal harus memperhatikan isu-isu yang relevan dan mendesak dalam masyarakat serta merespons dengan tindakan konkret. Melakukan pendekatan dengan mendorong partisipasi aktif generasi dalam proses politik lokal dan nasional melalui penyuluhan, diskusi, dan edukasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kinerja dan tanggung jawab partai politik dalam menjalankan fungsinya dengan menyesuaikan *platform* pemilih pemula. Selain itu, partai politik lokal juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai alat untuk mempromosikan dan menyebarkan informasi terkait partai. Partai politik lokal juga perlu meningkatkan pendidikan politik sebagai salah satu bentuk

kewajiban partai, sebab generasi Z memerlukan pengarahan terkait pemahaman tentang politik.

3. Untuk generasi Z, sebaiknya lakukan riset mandiri tentang partai politik lokal yang berpartisipasi dalam pemilihan. Mencari tahu program-program, visi, dan misi mereka serta rekam jejak kinerja mereka dalam melayani masyarakat dan berlaku juga untuk mencari tahu terkait pemahaman tentang partai politik nasional. Dalam hal ini juga generasi Z diharapkan tidak apatis terhadap politik, sebab gen-Z akan menjadi penerus dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya aspek politik dan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, B., Shadiqin, S. I., & Saby, Y. (2021). Membincangkan Damai Aceh: Politik, Agama dan Pendidikan yang Berkelanjutan.

- Arifin, Zainal dan Arifudin. 2017. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan politik dan partisipasi politik pemilih pemula. *MEDIAPSI*, 4(1), 1-6.
- Baidun, A. Pengaruh big-five personality, political efficacy, dan political trust terhadap partisipasi politik (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bayti, T. N., & Desi Ariani. (2020). Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045. Atambua Barat : Fianosa Publishing.
- Daftar anggota DPR Aceh periode 2014-2019 (<https://www.ajnn.net/news/daftar-anggota-dpr-aceh-periode-2014-2019/index.html>) diakses pada 09/11/2023)
- Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – Aceh (<https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-aceh>) diakses pada 09/11/2023)
- Daud, M. (2015). Prediktor Perilaku Pemilih pada Pemilu: Perspektif Psikologi Politik. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 1(1), 261380.
- Dyah. (2023, april 5). *antaranews.com*. Retrieved from infografis: <https://www.antaranews.com/infografik/3472725/meningkatkan-partisipasi-pemilih-muda-dalam-pemilu-2024> 26/08/2023
- Dani,S(2023,juli31).*Serambinews.com*<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/31/pemilih-milenial-banda-aceh-capai-66-ribu-kip-kota-gencar-sosialisasi> 26/08/2023
- Faisal Hanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015
- Fauzi. (2022, desember 20). *antaranews.com*. Retrieved from Partisipasi politik kaum muda pada Pemilu 2024 cukup tinggi: <https://www.antaranews.com/berita/3315218/survei-partisipasi-politik-kaum-muda-pada-pemilu-2024-cukup-tinggi> 26/08/2023
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

- Hasan, N. (2012). Islamist party, electoral politics and Da'wah mobilization among youth: The prosperous justice party (PKS) in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 17-47.
- Hajad, V., & Susetiawan, S. (2022). Diffusion of Ideology and Role of Local Party Control to Understand Aceh Post-War. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 71-88.sss
- Hidayatullah, M. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Faktor Kepercayaan Politik, Dan Faktor Psikologis Terhadap Perilaku Tidak Memilih (Golput) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 (Studi di Kecamatan (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Indonesia, D. P. R. R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Eko Jaya.
- Indonesia, P. R., & Merdeka, G. A. (2011). Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hlm.2
- Ikramatoun, S., Zulfan, Z., & Aminah, A. (2023). The Decline of Local Political Parties in Post-Conflict Aceh: A Qualitative Study. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(1), 41-57.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia.
- Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. (2005). Klausul 1.2.1*
- Muannas, M. (2018). Proses Gatekeeping Terkait Redistribusi Konten Media Sosial: Perspektif Generasi Z. *Jurnal Jurnalisa* , 4 (2).
- Nabilah Muhamad KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diakses pada 12/01/2024

- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276-292.
- Neumann, S., & Barghoorn, F. C. (1956). *Modern political parties: approaches to comparative politics*. (No Title).
- Nugraheni, A. (2023, februari 27). *kompas.id*. Retrieved from Preferensi Politik Gen Z Makin Terbaca:
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/27/preferensi-politik-gen-z-makin-terbaca> 26/08/2023
- Nur, M., Nurhamdah, N., Aswad, M., Ibrahim, A. R., & Rahman F, A. (2020). Political Behaviour and Participation of Beginner Voters in Regional Heads Elections. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 209-224.
- Nuriya, L. (2017). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ormas Dan Parpol Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi Deskriptif Analisis di Desa Cimalaka, Kec. Cimalaka Kab. Sumedang (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Nusir, I., Zulkarnain, I., & Ginting, R. (2020). Analisis Model Komunikasi Pada Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. *Persepsi: Communication Journal*, 3(1), 37-46.
- Partai Aceh. Sejarah berdirinya partai Aceh. <https://www.partaiaceh.org/profil.html> diakses pada 03/03/2024
- Partai Darul Aceh, Sejarah, <https://www.partaidarulaceh.id/sejarah/> diakses pada 13/01/2024
- Partai Nanggroe Aceh, Sejarah PNA, <https://dpwpnabandaaceh.or.id/tentang-kami/sejarah-partai/> diakses pada 13/01/2024
- Qanun Aceh Nomor. 3 Tahun 2008 Tentang partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2019). Perilaku Dan Partisipasi Politik Pemilih pemula. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP)* Universitas Jambi, 3.

Redaksi. Sejarah Lahir Partai Politik Lokal di Aceh. <https://www.readers.id/read/sejarahlahir-partai-politik-lokal-diaceh/index.html> diakses pada 03/03/2024

Ridho, M. H. (2023, Juni 5). *penejdar.com*. Retrieved from gen-z penyumbang rendahnya partisipasi pemilu: <https://www.penejdar.com/news/1909034537/gen-z-penyumbang-rendahnya-partisipasi-pemilu?page=2> 26/08/2023

Scarrow, S. E. (1993). Does local party organisation make a difference? Political parties and local government elections in Germany. *German Politics*, 2(3), 377-392.

Sitorus, M. S., & Sitorus, S. H. (2023). Partisipasi Pemilih pemula dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(2), 969-976.

Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2020). Symbolic political communication, and trust: a young voters' perspective of the Indonesian presidential election. *Journal of political marketing*, 19(1-2), 153-175.

Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.

Tamtomo, A. B. (2023, juli 25). *infografiskompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografik--milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-68-8-juta> 26/08/2023

Tranter, B & Skrbis, Z. (2009). Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders. *Australian Journal of Political Science*, 659 — 678

Törnquist, O., Prasetyo, S. A., & Birks, T. (2010). *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*, Yogyakarta.

Indonesia, Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Inilah 81 Calon Terpilih Anggota DPRA 2014-2019 dari 23 Kabupaten Kota (<https://lintasgayo.com/48401/inilah-calon-terpilih-anggota-dpra-2014-dari-23-kabupaten-dan-kota.html> diakses pada 09/11/2023)

UPDATE: Inilah Anggota DPRA 2009-2014 (<https://acehkita.com/update-inilah-anggota-dpra-2009-2014/> diakses pada 09/11/2023)

Van der Meer, T. W. (2017). Political trust and the “crisis of democracy”. In Oxford research encyclopedia of politics.

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih pemula di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 116-131.

Wibisana, C. (2023, juli 22). made for minds. Retrieved from Sebelum Meminta Gen Z Berpartisipasi dalam Pemilu: <https://www.dw.com/id/sebelum-meminta-gen-z-berpartisipasi-dalam-pemilu/a-65706306>

Widhy, I. K. S., & Basri, S. *Aktivisme Politik Pemilih pemula: Studi Kasus Partisipasi Politik Kalangan Pelajar di Kota Bekasi.*

Yolanda, H. P., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Pemilih pemula Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30-39.

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian

1. Sebagai generasi Z, sejauh mana anda mengenal partai – partai politik lokal yang ada di Aceh ?
2. Menurut anda, seberapa efektif partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) yang ada di Aceh?

3. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan politik generasi Z terhadap partai politik lokal, seperti PA, PDA, dan PNA di Aceh?
4. Apakah generasi Z memiliki kecenderungan untuk lebih mempercayai partai politik lokal dari pada yang lain? Mengapa?
5. Bagaimana penilaian anda sebagai generasi Z terhadap pencapaian dan kinerja partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) yang ada di Aceh? Contoh pencapaian dan kinerjanya?
6. Apakah anda merasa bahwa partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan dan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di Aceh, terutama aspirasi anak muda? Contoh perhatiannya?
7. Bagaimana anda menilai tingkat akuntabilitas dan komitmen partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) dalam menjalankan fungsinya? Contoh akuntabilitas dan komitmennya?
8. Menurut anda, apakah partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) Aceh sudah memberikan hasil kebijakan yang dapat diandalkan serta konsisten dalam memecahkan masalah-masalah kritis yang ada di masyarakat? Bukti keandalan dan konsistensinya?
9. Apa saja faktor atau peristiwa tertentu yang, menurut Anda, mempengaruhi generasi dalam membentuk kepercayaan politik terhadap partai politik lokal di Aceh?
10. Bagaimana peran personalitas pemimpin partai dalam memengaruhi tingkat kepercayaan generasi terhadap partai politik lokal?

11. Apakah kebijakan dan program partai politik lokal menjadi faktor utama dalam membentuk atau merusak kepercayaan politik generasi Z?
12. Apakah lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan politik generasi Z pada partai politik lokal?
13. Apakah terdapat peran aktor lain seperti institusi Pendidikan, ulama, tokoh masyarakat dll yang mempengaruhi tingkat kepercayaan generasi Z pada partai politik lokal?
14. Sejauh mana media massa memainkan peran dalam membentuk persepsi generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh?
15. Kita tahu bahwa partai politik lokal hanya ada di Aceh sedang provinsi lain tidak punya. Menurut anda, apakah untuk kedepannya masih perlu peran partai politik lokal (PA, PDA dan PNA) atau sebaliknya ?
16. Apa harapan utama sebagai generasi Z terhadap partai politik lokal di Aceh?

Lampiran 2.Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-198/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB)
2. Siswa/I dan Santriwan/I Sekolah Mengah Atas Aceh Besar
3. Politisi Muda Parlok dan Parnas
4. Komunitas Hobi
5. Kelompok Difabel
6. Enterpreneur Muda

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAMADHAN FITRIANI / 200801004**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Jln. Tgk Dibrang II Rukoh, Syiah Kuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **POLITICAL TRUST PEMILIH PEMULA TERHADAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Juli 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB)



Wawancara dengan Santriwan/I SLTA Sederaja



Wawancara dengan Siswa/I SLTA Sederajat



Wawancara Dengan Disabilitas



Wawancara Entrepreneur Muda



Wawancara Komunitas *SkateBoard & Surfing*



Wawancara dengan Politisi Muda